

Bab IX

Kegagapan Petani pada *Food Estate* Padi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Yanter Hutapea

Data dan informasi pembangunan pertanian yang benar diperlukan untuk menyusun strategi dan rencana pembangunan pertanian. Berbagai program sudah dilaksanakan di bidang pertanian, salah satunya *food estate* padi yang dilakukan dengan pendekatan kawasan berbasis korporasi petani untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Melalui Sensus Pertanian, kondisi terkini dengan segala permasalahannya diharapkan dapat diperoleh dengan benar. Upaya itu dilakukan dengan keterlibatan bukan saja petugas yang sudah dilatih secara berjenjang, namun juga berbagai pendekatan ke petani untuk mempermudah memperolehnya. Fakta menunjukkan petani masih diperhadapkan dengan kurang jelasnya pelaksanaan suatu program akibat lemahnya diseminasi yang dilakukan. Bahkan pelaksanaan program tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan.

Y. Hutapea

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: yant015@brin.go.id

© 2025 Editor & Penulis

Hutapea, Y. (2025). Kegagapan petani pada *food estate* padi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam R. A. Prayoga, B. Susantyo, & R. R. Amalia (Ed.), *Mencari suara petani hingga pelosok Nusantara: Catatan emik dari Sumatra jilid 1* (hal. 309–365). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.934.c945
E-ISBN: 978-602-6303-90-5

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bukan saja akibat kemampuan SDM pelaksanaanya yang terbatas, melainkan juga kondisi sumber daya alam yang muncul sebagai penghambatnya dan keterbatasan infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, keberlanjutan suatu program bukan hanya untuk memperluas capaian dampaknya, namun yang penting juga adalah untuk mewujudkan apa yang belum dicapai. Terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat kondisi yang dinamis baik internal maupun eksternal bidang pertanian, mendorong diperlukannya informasi yang tepat melalui pelaksanaan Sensus Pertanian, yang menjadi kunci untuk membuka kondisi yang sebenarnya,

A. Menerjemahkan Sensus Pertanian di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar

Kehidupan masyarakat memang bersifat dinamis, yang artinya mengalami perubahan dan tidak stagnan. Perubahan tersebut bisa berupa perubahan kecil hingga besar yang tentu membawa dampak besar pula. Perubahan yang terjadi merupakan suatu konsekuensi, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya penemuan baru di berbagai sektor. Perubahan pun tidak selalu tentang kemajuan, bisa juga tentang kemunduran. Perubahan di sektor pertanian, misalnya bisa dipandang hanya dari satu sisi saja. Sebab satu perubahan bisa mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lainnya.

Untuk memperoleh informasi yang lengkap terkait kondisi sektor pertanian, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan data/informasi dari petani sebagai pelaku usaha melalui sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data dari seluruh elemen populasi yang diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*), atau sering juga disebut parameter. Sensus pertanian memberikan data sebenarnya tentang keadaan pertanian.

Kegiatan sensus pertanian menjadi penting karena data pertanian dan pesertanya selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga harus diperbarui secara berkala. Terlebih, data statistik pertanian penting

bagi negara untuk menyusun perencanaan pembangunan pertanian, kebijakan, hingga evaluasinya. Sebagai contoh, upaya penggabungan data hasil sensus dengan survei menjadi unit data geografis administratif telah dilakukan di tujuh negara mediterania untuk mengkarakterisasi dinamika praktik pertanian, keanekaragaman spesies dan sistem pangannya (Villani et al., 2019). Bahkan penggunaan data hasil sensus pertanian dan survei rumah tangga di 55 negara digunakan untuk mengukur produksi tanaman yang mencakup 154 spesies tanaman dan 11 kelas luas lahan (Ricciardi et al., 2018). Oleh karena itu, ketepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan mempengaruhi perencanaan, sehingga sejak awal perlu ditentukan informasi apa saja yang harus digali.

Bagi pelaku usaha pertanian, data sensus akan membantu memprediksi potensi bisnis di masa depan sekaligus mendeteksi risiko yang mungkin timbul. Misalnya, temuan hasil sensus pertanian di Bangladesh menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan pasar terhadap layanan jasa pengolahan lahan, irigasi, dan pasca panen karena penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) terbukti dapat meningkatkan produktivitas lahan, meskipun investasi modal untuk peralatan tersebut masih menjadi kendala kepemilikan pada petani kecil (Mottaleb et al., 2016).

Sensus Pertanian di Indonesia dilakukan tiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Sensus Pertanian 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak dimulainya yang pertama tahun 1963. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini juga mengacu pada program Badan Pangan Dunia yaitu *World Programme for the Census of Agriculture 2020*.

Salah satu program strategis nasional 2020–2024 adalah *food estate* (FE). Secara harfiah, FE berarti perusahaan pertanian pangan. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu lokasi pelaksanaan program ini. Konsep dasar FE diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem rantai nilai produksi pangan yang berskala luas di dalam suatu kawasan (Kementerian

Pertanian RI, 2020; 2019). Petani yang terlibat pada program ini termasuk petani yang disensus pada tahun 2023 ini yakni di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, dan Kecamatan Jejawi.

Tujuan utama Sensus Pertanian 2023 adalah untuk mendapatkan data pertanian yang berkualitas. Ini artinya hasil sensus yang didapatkan dapat mengungkap fenomena sosial budaya dan ekonomi sebagai latar belakang kehidupan masyarakat petani yang dihadapkan pada lingkungan sekitar, sumber daya alam, serta kebijakan dan program pemerintah yang ada. Sebagai upaya mengawal pelaksanaan pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 dan memotivasi petugas di lapangan, maka dilakukan: 1) pendampingan, monitoring dan evaluasi secara eksternal terhadap pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI, dan 2) penggalan perspektif, latar belakang dan realitas ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat petani yang didata secara emik, untuk menjadi penguat dan pelengkap dari proses pendataan kuantitatif, terfokus pada petani padi yang masuk dalam wilayah program FE di Kabupaten OKI.

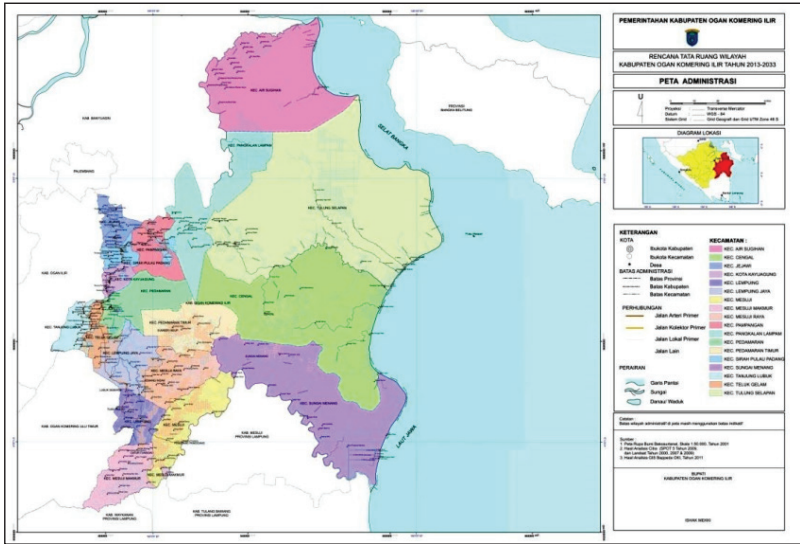
Cara yang dilakukan ini juga sebagai upaya perbaikan dalam mendesain suatu kebijakan pembangunan pertanian. Seperti yang telah dilakukan di Jepang, yakni data deret waktu sensus pertanian sebelumnya (alokasi penggunaan lahan, gaya manajemen, dan partisipasi dalam lingkungan pertanian) telah digunakan untuk memperbaiki persepsi berbasis tipologi petani (Guillem et al., 2012).

B. Bentang Alam Pertanian: Mengenal Awal Lingkungan Sensus

Sebagai salah satu dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten OKI berada pada posisi 2°30'–4°15' Lintang Selatan, dan 104°20'–106°00' Bujur Timur. Wilayah kabupaten ini luasnya 19.023,47 km². Secara administrasi, kabupaten ini memiliki 18 kecamatan dengan 327 desa/kelurahan. Tulung Selapan dengan luas 5 363,65 km² merupakan kecamatan yang paling luas, sedangkan Sirih Pulau Padang dengan luas 102,08 km² merupakan wilayah yang terkecil. Kecamatan yang paling dekat posisinya dengan Kota Kayu

Agung sebagai ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Teluk Gelam (17 km) dan yang paling jauh adalah Kecamatan Air Sugihan (200 km) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir [BPS OKI], 2023).

Kabupaten OKI berada di dataran rendah bagian timur Sumatra (lihat Gambar 9.1). Tipologi wilayahnya sebagian besar berawa, yakni lahan basah menutupi kurang lebih 75% wilayah OKI dan berada di wilayah timur, seperti kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, dan Sungai Menang yang tergambar dari wujud wilayahnya berupa lahan rawa pasang surut dan lebak. Adapun dataran kering juga dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti Kecamatan Mesuji Makmur, Lempuing, dan Lempuing Jaya yang tergambar dari wilayahnya berupa perkebunan, lahan tadah hujan, dan lahan kering. Kabupaten ini memiliki bentang alam berupa lembah, datar, dan bergelombang dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di Kecamatan Mesuji Makmur yang memiliki ketinggian hingga 45 meter dpl, sedangkan yang terendah adalah



Sumber: BPS OKI (2023)

Gambar 9.1 Peta Wilayah Kabupaten OKI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kecamatan Air Sugihan yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter dpl (BPS OKI, 2023).

Berdasarkan daerah aliran sungai (DAS), Kabupaten OKI dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu DAS Musi, Bulurinding, dan Mesuji. Selain tiga sistem DAS tersebut, di kawasan ini juga terdapat danau, yang terbesar di antaranya adalah Danau Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, Danau Air Nilang di Kecamatan Pedamaran, dan Danau Teluk Gelam yang kini sudah menjadi tujuan wisata, terutama wisatawan lokal. Demikian juga dengan Danau Teloko di Kota Kayu Agung. Selain sungai dan danau, dalam sistem hidrologi Kabupaten OKI juga terdapat rawa lebak yang volume airnya sebagian besar bersifat musiman. Pada musim kemarau, airnya mengering dan di musim hujan tergenang dikenal dengan lebak pematang atau lebak dangkal. Di wilayah lebak dalam terdapat cekungan yang airnya tidak pernah kering. Oleh masyarakat OKI disebut dengan lebak lebung. Kawasan lebak lebung ini memiliki sumber daya perikanan yang besar dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan air tawar.

Penduduk di Kabupaten OKI pada tahun 2021 berjumlah 772.742 jiwa, yang termasuk ke dalam 208.172 kepala keluarga (KK). Sebagian besar (61,10%) terkategori dalam keluarga sejahtera I, sedangkan yang terkategori dalam keluarga prasejahtera sebanyak 12,72% (Badan Pusat Statistik Sumsel, 2022).

Menurut lapangan usahanya, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 62,07%. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten OKI sebanyak 433.315 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun tingkat pengangguran di Kabupaten OKI pada tahun 2021 sebesar 3,01%, menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang besarnya 3,29 %.

Sebagai salah satu wilayah di Sumatra Selatan yang dikembangkan sebagai *food estate* (FE) padi, data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten OKI memiliki luas tanam padi di sawah irigasi 7.385 ha, sawah tadah hujan 37.173 ha, sawah pasang surut 31.898 ha,

sawah lebak 44.810 ha, dan ladang/huma seluas 1.752 ha. Secara keseluruhan, jumlah luas tanam padi di Kabupaten OKI tahun 2021 tersebut adalah 123.017 ha. Tentunya luas tanam ini melebihi luas lahan sawah yang ada karena penanaman yang lebih dari satu kali di sawah irigasi, tadah hujan, sebagian pasang surut dan lebak. Kabupaten OKI menyediakan lahan seluas 59.118 ha untuk mendukung program FE dengan beragam komoditas yang berada di 17 kecamatan. Sementara itu, terdapat lima kecamatan yang dijadikan lokus supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI (Tabel 9.1)

Tabel 9.1 Lokasi Supervisi Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI

No.	Kecamatan	Desa	Dusun	RT	Etnis dominan	Tanggal
1.	Lempuing	Tugu Mulyo	5	01	Jawa	13 Juni 2023
2.	Lempuing	Tugu Agung	2	04	Jawa	13 Juni 2023
3.	Lempuing Jaya	Sungai Belida	3	03	Jawa	14 Juni 2023
4.	Lempuing Jaya	Lubuk Makmur	4	08	Jawa	14 Juni 2023
5	Jejaw	Tanjung Aur	2	05	Melayu	15 Juni 2023

Sumber: BPS OKI (2023)

Wilayah yang sudah terwujud sebagai kawasan FE berbasis komoditi padi adalah di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya. Sementara itu, tiga kecamatan lain yang juga sudah mendapatkan rencana yang sama, yaitu Sungai Menang seluas 7.885 ha, Pampangan 6.271 ha, dan Jejaw seluas 6.041 ha, sampai saat ini belum terwujud klaster apalagi kawasannya. Pelaksanaan supervisi Sensus Pertanian 2023 dilakukan di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya sebagai wilayah yang sudah terwujud kawasan FE, sedangkan Kecamatan Jejaw sebagai wilayah yang direncanakan tetapi belum terwujud kawasan FE.

Pusat Desa Tugumulyo berada di tepi jalan Lintas Timur Kecamatan Lempuing OKI, sehingga aksesibilitas ke wilayah desa ini terkategori lancar, dengan sinyal telepon seluler sangat kuat. Desa Tugumulyo berjarak 76 km dari Kota Kayu Agung. Desa ini luasnya 15,10 km², dengan topografi wilayah yang cenderung datar. Umumnya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

desa-desa di Kecamatan Lempuing berada pada ketinggian 10 m dpl. Penduduk Desa Tugumulyo berjumlah 12.468 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.330 KK yang berada di 5 dusun dan 22 RT dengan etnis dominan adalah Jawa. Sebagian besar (80%) mata pencaharian penduduknya adalah petani, sisanya pedagang dan PNS.

Wilayah desa ini tidak dilalui sungai sehingga persawahan penduduk hanya mengandalkan air hujan dan sumur bor. Luas sawah di desa ini 957 ha. Pada saat kemarau basah seperti tahun lalu, sebanyak 65% petani sudah menanam dengan pola padi-padi-padi. Pola ini dikenal juga dengan istilah IP padi 300. Sebanyak 20% petani menanam dengan pola padi-padi, dan dilanjutkan dengan palawija atau sayuran untuk pertanaman ketiganya. Sementara itu, 15% petani lainnya menanam dengan pola padi-padi. Penanaman padi dengan sistem tanam legowo dominan dilakukan di Kecamatan Lempuing.

Untuk menunjang sektor pertanian, di wilayah desa ini, terdapat tujuh unit bank pemerintah dan tiga unit bank swasta. Terdapat dua unit pasar yang melayani kebutuhan hidup masyarakatnya. Untuk memperoleh sarana produksi pertanian, di desa ini juga terdapat enam unit kios saprodi. Sebanyak 20 unit penggilingan padi berada di wilayah desa ini, meskipun kapasitas produksinya sudah jauh menurun karena petani saat ini menjual langsung gabah kering panen (GKP). Beroperasinya penggilingan padi tersebut bertujuan untuk menggiling beras yang akan dikonsumsi rumah tangga saja. Hal ini terjadi umumnya pada penggilingan padi di Kecamatan Lempuing. Namun, diakui masih ada beberapa penggilingan yang menjual beras ke pengepul, agen, dan pedagang grosir. Terdapat satu orang pedagang pengumpul karet yang biasa melayani penampungan karet di desa ini, tetapi belum ada unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (UPPB). Para petani juga tergabung dalam 23 kelompok tani, tiga kelompok wanita tani, dan satu gabungan kelompok tani (gapoktan). Untuk melayani kebutuhan alat dan mesin pertanian, selain dikelola secara pribadi, di desa ini juga terdapat dua unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA). Terhadap peralatan dan mesin-mesin yang rusak, dapat dilayani oleh perbengkelan yang ada. Namun, dari

12 unit bengkel tersebut tidak semuanya dapat melayani perbaikan alsintan.

Masih di wilayah Kecamatan Lempuing, Desa Tugu Agung dengan luas wilayah 8,08 km², berpenduduk 4.203 jiwa yang masuk dalam 1.330 KK, menyebar pada lima dusun dan 14 RT. Desa Tugu Agung, yang berjarak 79 km dari kota Kayu Agung, juga memiliki aksesibilitas yang lancar untuk dilalui kendaraan roda empat, dengan sinyal telepon seluler terkategori kuat. Kekuatan sinyal telepon ini menjadi penting, karena saat ini banyak petani yang menerima informasi termasuk informasi pertanian dari sesama teman atau penyuluh menggunakan telepon seluler. Mata pencaharian utama penduduk adalah di bidang pertanian yang melibatkan 90% KK, sisanya mereka terkategori pedagang dan PNS.

Luas sawah di Desa Tugu Agung mencapai 550 ha dengan pola tanam padi-padi-padi dan padi-padi. Selain air hujan dan sumur bor (Gambar 9.2), sumber air juga didapatkan dari air sungai yang mengalir di wilayah desa ini. Terdapat lembaga yang mendukung berkembangnya sektor pertanian, seperti kelompok tani sebanyak



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.2 Penggunaan Alsintan Mendukung Peningkatan IP Padi di Lahan Tadah Hujan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.3 Pengolahan Lahan Menggunakan Traktor Roda Dua

tujuh kelompok dan satu gapoktan, kios saprodi dua unit, penggilingan padi 22 unit, UPJA satu unit, dan adanya perbengkelan meskipun masih bersifat umum yang dapat juga memperbaiki mesin pertanian. Untuk perawatan alsintan (lihat Gambar 9.3), beberapa teknisi bengkel dapat dipanggil untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Selain itu, ada juga satu pedagang pengumpul karet dan tiga pedagang pengumpul beras/padi. Petani yang memiliki pohon karet di wilayah Kecamatan Lempuing terpaksa memasarkan bahan olah karet (BOKAR) melalui satu orang pedagang pengumpul. Hal ini karena UPPB terdekat, yaitu UPPB Sumber Rezeki, berada di desa tetangga, yaitu Desa Kepahyang, Lempuing. Meskipun di desa ini tidak ada lembaga perbankan, tetapi lembaga tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena posisinya yang dekat di desa tetangga (Desa Tugumulyo).

Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya berjarak 63 km dari Kota Kayu Agung, sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat. Jumlah penduduk di desa ini ada 4.788 jiwa yang masuk dalam 2.089 KK. Mereka tersebar ke dalam lima dusun dan 15 RT. Umumnya, desa-desa di Kecamatan Lempuing Jaya berada pada ketinggian 10 m dpl. Luas wilayah desa ini 15,86 km², di dalamnya terdapat 1.085 ha sawah tadah hujan yang ditanami dengan pola

padi-padi. Sumber airnya selain berasal dari air hujan dan air sungai. Musim rendeng penanaman padi antara bulan November–April, dilanjutkan kembali musim gadu sampai dengan bulan Juli/Agustus. Namun, ada juga petani yang melanjutkan penanaman jagung setelah panen padi penanaman kedua.

Untuk mendukung pengembangan pertanian di wilayah ini, terdapat satu unit pasar desa dan lima unit kios saprodi, selain beberapa orang petugas atau formulator dari perusahaan pestisida. Pembinaan petani juga dilakukan penyuluh melalui 24 kelompok yang ada, dan seluruh kelompok ini juga disatukan dalam 1 gapoktan. Untuk penyediaan alat dan mesin pertanian, selain dimiliki secara pribadi yang dapat disewa, juga terdapat satu unit UPJA. Kerusakan terhadap alsintan dapat diperbaiki oleh operator bengkel lokal ataupun luar desa, walaupun masih berupa bengkel umum. Saat ini hasil panen padi dengan mudah dipasarkan dalam bentuk GKP sehingga 17 pabrik penggilingan padi yang ada menurun aktivitasnya. Di desa ini juga terdapat tiga pedagang pengumpul sayur yang mengumpulkan sayuran, hasil tanam di pekarangan, pematang sawah atau ladang, dan satu pedagang pengumpul karet. Pembinaan terhadap petani karet dilakukan oleh penyuluh. Layanan UPPB di Kecamatan Lempuing Jaya ada di dua desa, yaitu UPPB Mitra Tani di Desa Sukajaya dan UPPB Lambang Sari di Desa Tanjung Sari II. Namun, kedua UPPB tersebut melayani di desa masing-masing saja. Oleh karena itu, petani karet di desa yang tidak ada UPPB, hanya menjual BOKAR ke pedagang pengumpul saja.

Di Desa Lubuk Makmur (masih di Kecamatan Lempuing Jaya) jumlah penduduknya 5.444 jiwa yang termasuk ke dalam 2.127 KK, bermukim di enam dusun pada 21 RT yang ada. Untuk berkomunikasi dengan telepon seluler tidaklah sulit karena sinyal di desa ini terkategori kuat. Jarak desa ini dengan kota Kayu Agung sejauh 62 km, dengan aksesibilitas wilayah yang lancar karena dapat dilalui kendaraan roda empat. Sebanyak 90% dari kepala keluarga yang ada disana menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian di sektor pertanian. Seluas 2.000 ha sawah tadah hujan terdapat di desa ini yang sumber airnya dari sumur bor, sungai, bahkan air hujan. Selain

pola tanam padi-padi yang dominan, sistem tanam padi di Kecamatan Lempuing Jaya juga banyak dilakukan dengan sistem legowo.

Pengembangan sektor pertanian didukung dengan tersedianya kelompok tani dan gapoktan, lima kios saprodi, 13 pabrik penggilingan padi, satu UPJA dan didukung dengan perbengkelannya. Selain dikelola UPJA, secara pribadi banyak juga pemilik traktor roda dua, tetapi traktor besar roda empat dirasakan masih kurang ketersediaannya terutama jika dikaitkan dengan percepatan tanam. Penggilingan padi di desa ini umumnya sudah dilengkapi dengan *bed dryer* yang bahan bakarnya dari kayu. Terdapat empat orang pedagang pengumpul sayur dan sepuluh orang pengumpul BOKAR yang biasa beraktifitas. Meskipun di dalam desa belum ada bank, tetapi untuk urusan simpan pinjam bukanlah masalah karena di Desa Lubuk Seberuk yang posisinya di sebelah desa ini terdapat tiga unit bank umum pemerintah dan tersedia juga dua unit pasar.

Desa Tanjung Aur luasnya 23,27 km² yang merupakan desa terluas di Kecamatan Jejawi, berjarak 69 km dari kota Kayu Agung, dengan ketinggian berada hanya 8 m dpl. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.048 jiwa terdiri dari 370 KK. Meskipun penduduknya memiliki profesi yang beragam, tetapi diyakini sumber mata pencaharian kepala keluarga semuanya dari sektor pertanian. Akses ke wilayah desa ini dikategorikan lancar, dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Untuk berkomunikasi, juga didukung dengan sinyal telepon seluler yang kuat.

Topografi wilayah desa tersebut adalah landai dan sebagian kecil bergelombang. Luas sawahnya 832 ha dengan jenis sawah lebak yang dipengaruhi oleh air sungai. Hanya 15% persen sawah tersebut yang diusahakan padi dengan pola padi-padi yang keberadaannya di lebak pematang. Sementara itu di lebak tengahan, apalagi lebak dalam, hanya ditanam padi satu kali dalam satu tahun. Sistem tanam padi bermacam-macam, ada yang sistem hambur benih, ada juga yang tanam pindah. Di hamparan sawah dari lebak pematang ke lebak tengahan terdapat saluran air irigasi, tanggul penangkis yang dikombinasikan dengan pintu air dari saluran ke muara sungai. Paling tidak sudah ada empat pintu air di persawahan.

Pemilik sapi disinyalir hanya 5% dari KK yang ada, tetapi keberadaan ternak tersebut cukup menarik perhatian begitu memasuki wilayah pemukiman. Hal ini dikarenakan kandangnya dalam ukuran besar berada justru di tepi jalan dan dekat dengan rumah penduduk. Saat ini terdapat kurang lebih 800 ekor sapi di desa tersebut, tetapi tidak banyak petani yang menggunakannya kotoran ternak untuk pupuk organik tanamannya. Kalaupun digunakan, kotoran hewan yang sudah lama tersebut langsung saja digunakan tanpa proses pengolahan.

Beberapa kelembagaan pendukung pertanian yang ada seperti keberadaan 11 kelompok tani dan satu gapoktan, dua pengumpul karet dan satu belantik sapi. Saat ini, keberadaan penggilingan padi tetap eksis karena hanya ada satu unit, diperlukan petani untuk menggiling gabahnya, meskipun masyarakat juga sudah menjual GKP ke pedagang besar. Sementara itu, desa ini belum memiliki lembaga penunjang lainnya, seperti pasar desa, kios saprodi, dan UPJA. Hal ini menggambarkan keterbatasan perkembangan pertanian di wilayah desa ini. Kedekatan dan kemudahan memperolehnya di Palembang dijadikan sebagai alasannya.

C. Menelisik Ragam Variabel Sensus Pertanian versi Lokal

Pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas petani dilakukan dengan metode kualitatif melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu 1) wawancara mendalam terhadap para pelaku kegiatan sensus pertanian, khususnya dari sisi pendata dan masyarakat petani yang didata (lihat Gambar 9.4–9.6); dan 2) observasi atas proses pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Pertanyaan pada Sensus Pertanian 2023 tersedia dan digunakan untuk mencacah di seantero Indonesia.

Dikaitkan dengan pertanyaan mendalam tentang kondisi pertanian di tengah gelanggang FE padi, maka secara lokal terdapat variabel sensus yang spesifik sifatnya, yang dapat saja terdapat kesamaan variabel melalui pertanyaan PPL pada Sensus Pertanian 2023 tersebut. Jika dielaborasikan dengan pertanyaan Sensus Pertanian



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.4 Wawancara Petani di Kec. Lempuing



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.5 Wawancara Petani di Kec. Lempuing Jaya



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.6 Wawancara Petani di Kec. Jejaw

2023 yang tersedia, maka variabel versi lokal yang diliput terdiri dari beberapa poin berikut ini.

- 1) Domisili petani, mencakup alamat tempat tinggal (RT, dusun, desa, dan kecamatan), jarak desa ke ibukota kabupaten, luas desa, topografi desa, dan aksesibilitas ke desa.
- 2) Karakteristik petani dan keluarga, mencakup nama, umur, pekerjaan, pendidikan, asal dan etnis petani, jumlah anggota keluarga, anggota keluarga yang terlibat pada usaha pertanian, status pernikahan, pekerjaan pokok dan pekerjaan luar pertanian, keanggotaan pada lembaga/organisasi, motivasi, aktivitas yang dilakukan di bidang pertanian dan keberhasilan yang dicapai.
- 3) Pemilikan aset:
 - a) Lahan sawah (tadah hujan, lebak), meliputi jenis, luas dan peruntukan lahan, peluang memiliki lahan sawah di dalam atau di luar desa.
 - b) Lahan kebun di dalam dan luar desa.
 - c) Tanaman semusim dan tahunan yang diusahakan; nama tanaman, luas tanam.

- d) Ternak (besar, kecil dan unggas) yang dipelihara; jenis dan jumlah ternak, luas kandang ternak.
 - e) Rumah domisili, meliputi ukuran dan kondisi rumah.
 - f) Kendaraan, meliputi jenis dan jumlah kendaraan roda dua dan empat.
 - g) Alat dan mesin pertanian, meliputi jumlah dan jenis pemilikan alat dan mesin pertanian.
- 4) Inovasi pertanian, mencakup pola tanam berbasis padi di lahan sawah, penerapan teknologi budi daya pada FE (persiapan lahan, sumber pengairan: sungai, sumur bor, hujan), saluran irigasi, varietas, perlakuan benih, jumlah benih, sistem dan jarak tanam, pemupukan (jenis, dosis, cara dan waktu, hama dan penyakit dominan dan penanggulangannya, gulma, panen, pasca panen), kemudahan mengakses inovasi pertanian.
 - 5) Permasalahan dalam penyediaan dan aplikasi saprodi (lahan, pupuk, pestisida, alsintan, tenaga kerja keluarga dan upahan), pelaksanaan panen dan pasca panen, diversifikasi dan pemasaran produk utama (padi).
 - 6) Kelembagaan pertanian dan pendukungnya, mencakup keberadaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, jumlah pedagang pengumpul berdasarkan jenis komoditi, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPIA), bengkel lokal, penggilingan padi, unit pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (UPPB), kios sarana produksi pertanian, koperasi, pasar desa, dan perbankan.
 - 7) Proses pembentukan FE, mencakup keterlibatan petani sejak awal pada program, data dan kelengkapan administrasi yang diperlukan, sosialisasi yang dilakukan, pemahaman petani terhadap program, keterkaitan sub sektor/instansi terkait pada pelaksanaan FE (pembuatan jalan, pembuatan saluran irigasi, pintu air, dan pengerukan saluran).
 - 8) Unit-unit usaha atau kelembagaan pendukung pertanian pada tingkat petani, klaster dan kawasan di lokasi FE padi. Pada tingkat petani, bagaimana aspek budidaya dan pasca panen,

dan perubahan pada petani terkait program FE. Pada tingkat klaster meliputi (keberadaan BUMS, UPJA dengan peralatan modern, usaha pengadaan saprodi, RMU yang aktif, pengolahan hasil primer, lembaga pemasaran (pedagang hasil). Pada tingkat kawasan (terbentuknya korporasi petani dengan dukungan dana dari petani/swasta, usaha penyediaan saprodi, pengolahan/diversifikasi lanjut (beras premium), hasil samping, usaha jasa keuangan, maupun unit pemasaran/*off taker*)

- 9) Pemasaran produk utama dan ikutan padi (gabah, sekam, dedak) dan aktivitas pasca panen padi, apa keunggulan dan kelemahan petani dalam mata rantai produk tersebut.

Selain informasi tersebut, diperoleh juga data sekunder yang bersumber dari BPS dan dari dinas/instansi terkait lainnya. Upaya pengumpulan data sekunder ini dilakukan untuk melengkapi data wilayah atau desa yang lebih tepat diperoleh melalui cara ini akibat keterbatasan informasi yang diperoleh dari petani. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu wilayah tertentu. Data sekunder ini meliputi jumlah penduduk dan mata pencaharian, batas wilayah, ketinggian tempat dari permukaan laut, topografi wilayah, hidrologi, luas tanam padi di berbagai agroekosistem, jumlah dusun dan RT, aksesibilitas dan jarak desa ke ibukota kabupaten, serta kelembagaan penunjang sektor pertanian. Selain dari tingkat desa, data tersebut juga menggambarkan keadaan kecamatan dan kabupaten.

D. Mendata Penuh Daya Upaya

Seperti halnya di kabupaten lain, Sensus Pertanian 2023 juga dilaksanakan di Kabupaten OKI Sumatra Selatan. Dalam mekanisme pelaksanaannya, Kepala BPS Kabupaten OKI bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten OKI yang dibantu oleh Bidang Administrasi, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Risiko; Bidang Teknis Pendataan dan Manajemen Lapangan; Bidang Pengolahan, Teknologi Informasi, dan Diseminasi; Bidang Analisis dan Kualitas Data; Bidang Integrasi Data

Statistik Sosial dan Statistik Pertanian; Bidang Integrasi Data Statistik Distribusi dan Jasa dan Statistik Pertanian dalam menyusun strategi dan rencana kerja sesuai bidangnya masing-masing.

Dikaitkan dengan wilayah pengembangan FE padi, pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya dan Jejawi Kab. OKI pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), pencacahannya dilakukan menggunakan metode *door to door*. Alat (moda) yang digunakan untuk pencacahan adalah lembaran kuesioner/*paper assisted personal interviewing* (PAPI).

Petugas lapangan UTP terdiri dari Koordinator kecamatan (koseka), pemeriksa lapangan sensus (PML), dan petugas lapangan sensus (PPL) (lihat Gambar 9.7). Seorang PPL bertugas untuk melakukan pencacahan usaha pertanian perorangan. Seorang PML bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa. Seorang koseka juga bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa (lihat Gambar 9.8). Baik seorang koseka, PML, maupun PPL wajib mengikuti pelatihan sebelum pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Organisasi lapangan Sensus Pertanian 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Di tingkat kecamatan, terdapat 1–2 orang Koseka. Satu orang koseka bertanggung jawab mengawasi kurang lebih 10 PML di wilayah tugasnya. Koseka diutamakan pegawai organik BPS yang ditugaskan menangani kecamatan.
- 2) Satu orang PML membawahi sekitar enam orang PPL. Tenaga PML diutamakan organik BPS atau mitra yang berpengalaman dalam kegiatan sensus/survei.
- 3) Satu orang PPL melakukan pencacahan sekitar 200–300 KK di wilayah SLS konsentrasi (metode *door to door*).

Pada tingkat lapangan, baik koseka, PML, maupun PPL memiliki tugas secara perorangan maupun bersama-sama. Seorang koseka memiliki tugas dan tanggung jawab membantu BPS Kabupaten OKI dalam mengalokasikan wilayah kerja PML dan PPL. Koseka bersama dengan PML, berkoordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setempat dan menginformasikan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan Sensus Per-

tanian 2023. Dia juga melakukan pendampingan terhadap PPL yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam hal melakukan wawancara, mencatat, bahkan dalam bersikap. Selanjutnya data hasil pencatatan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.7 Koordinasi di BPS Kab. OKI



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.8 Pengumpulan Data di BPS Kab. OKI

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PPL yang dikumpulkan oleh PML, diperiksa oleh koseka. Apabila terdapat kesalahan hasil pencacahan sampel oleh PPL, maka koseka menolaknya dengan menuliskan catatan kesalahannya. Jika tidak ada ditemui kesalahan pencacahan lengkap oleh PPL, maka koseka menyetujuinya. Pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini, jika wilayah tugasnya terpilih menjadi sampel monitoring kualitas, maka koseka berkoordinasi dengan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023. Koseka bersama dengan PML dan PPL menindaklanjuti hasil temuan petugas monitoring yang diberikan BPS Kabupaten OKI dan memperbaikinya jika ditemui kesalahan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan tindak lanjut temuan monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 dilaporkan koseka ke BPS Kabupaten OKI.

Seorang PML memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengenali batas-batas blok sensus bersama PPL pada wilayah tugasnya dan melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah, ketua SLS untuk menginformasikan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Jika terjadi perubahan wilayah SLS dari PPL, maka PML meneruskannya kepada koseka untuk dilakukan penetapan wilayah baru. PML melakukan pendampingan terhadap PPL yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam hal melakukan wawancara, mencatat, bahkan dalam bersikap. Selanjutnya, PML memeriksa data yang dikumpulkan dan dikirim oleh PPL. Jika terdapat kesalahan pencacahan oleh PPL, maka PML menolaknya dengan membuat catatan kesalahan untuk diperbaiki, dan menyetujui hasil pencacahan PPL bila tidak ditemukan lagi kesalahan. PML berkoordinasi dengan koseka dan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 apabila wilayah tugasnya menjadi sampel monitoring kualitas, untuk mempersiapkan instrumen pendukungnya. Selanjutnya, PML bersama PPL dan Koseka memperbaiki kesalahan yang ditemukan oleh petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023 dan menyusun laporan hasil perbaikannya sebagai tindak lanjut dari instruksi temuan monitoring kualitas tersebut.

Seorang PPL memiliki tugas dan wewenang bersama PML untuk melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua SLS setem-

pat guna menginformasikan kegiatan apa yang akan mereka lakukan terkait dengan pelaksanaan ST2023 ini. PPL melakukan penandaan lokasi (*geotagging*) dengan aplikasi Wilkerstat untuk bangunan rumah tangga pertanian di wilayah PAPI. Melakukan pencacahan lapangan dengan menggunakan formulir atau kuesioner yang sudah dipersiapkan sesuai wilayah tugasnya dan mengirim data yang sudah diinput ke PML. Jika hasil pencacahan tersebut ditolak PML akibat ditemukan kesalahan, maka PPL wajib memperbaikinya, termasuk melakukan konfirmasi kembali ke petani sampai diperoleh data yang benar. Apabila wilayahnya menjadi lokasi sampel monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023, maka PPL bersama dengan petugas monitoring kualitas Sensus Pertanian 2023, koseka, dan PML melakukan pemeriksaan ulang, konfirmasi, dan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kesalahan.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini di tingkat lapangan diwarnai berbagai dinamika (lihat Gambar 9.9 dan 9.10). Diakui terdapat kesulitan juga dalam pencacahan oleh PPL ini karena beberapa faktor kondisi berikut ini.

- 1) Di tengah kesibukan petani, adakalanya muncul anggapan tak ada manfaat Sensus Pertanian 2023 bagi mereka. Muncul pertanyaan pada petani, seperti apa pentingnya sensus ini bagi mereka?.
- 2) Di balik pertanyaan yang mereka jawab, muncul kekhawatiran pada petani akan naiknya pajak rumah tangga akibat sensus ini.
- 3) Curiga terhadap petugas pun terjadi. Tidak berlebihan jika belajar dari pengalaman sebelumnya, beberapa di antara petani turut diperiksa oleh yang berwajib akibat pelaksanaan kegiatan yang diswakelolakan pada petani.

Perlu adanya pendekatan dan penjelasan di awal terhadap pemangku adat atau tokoh masyarakat, agar tidak timbul persepsi yang keliru pada saat petugas pencacah datang menemui petani, apalagi menduga akan adanya bantuan. Data dan informasi yang dikumpulkan demikian penting dan Sensus Pertanian 2023 merupakan milik



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.9 Diskusi antara Koseka dengan PPM dan PPL di Kec. Lempuing Jaya



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.10 Berbagai Upaya PPL Mencacah di Kec. Teluk Gelam

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bersama yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Para tokoh inilah yang diharapkan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada warga akan pentingnya Sensus Pertanian 2023, termasuk apa saja yang akan ditanyakan petugas dan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan.

Awalnya PPL didampingi PML karena ada rasa khawatir. Adakalanya PPL grogi karena mereka baru direkrut dengan melamar jadi petugas PPL secara *online*, walaupun telah dilakukan pelatihan. Setelah mencacah 3–5 rumah, biasanya PPL sudah mulai lancar mencacah, tidak canggung lagi. Kondisi cuaca yang panas mengakibatkan PPL juga mengalami kelelahan fisik, mereka mencacah bahkan sampai larut malam dan bahkan sering harus tidur di lokasi petani. Latar belakang pendidikan petani memang beragam. Adakalanya kurang paham dengan apa yang ditanya, sedangkan petani lain dengan mudah dapat menjawabnya. Untuk hal seperti ini, PPL pun harus mengulang pertanyaan dan berupaya menjelaskan maksudnya agar mudah dipahami oleh responden. Terdengar juga ada PPL yang mengalami gangguan dengan kendaraan roda duanya, walaupun memang segera bisa diatasi dan dapat aktif kembali.

E. Petani Ditengah Impitan Luasan Lahan

Di Kecamatan Lempuing, terdapat empat desa transmigrasi, yaitu Desa Dabuk Rejo, Sumber Mulyo, Bumi Harjo, dan Bumi Harjo Makmur. Di desa tersebut tidak ada lahan sawahnya. Namun, sebagai peserta transmigrasi mereka awalnya memiliki kebun karet 2 ha, yang saat ini berkisar 1–2 ha. Jika mereka memiliki sawah, maka lokasinya terdapat di luar desa dengan cara menyewa atau membeli.

Sebanyak 15 desa lainnya terdiri dari 12 desa transmigrasi lokal (translok) dan tiga desa yang lain, yaitu Desa Kepahyang, Cahya Bumi, dan Kuta Pandan yang awalnya adalah desa dengan penduduk asli. Transmigrasi lokal ini umumnya berasal dari Belitang, Ogan Komering Ulu Timur yang dimulai pada tahun 1971. Pemilikan lahan sawah di desa translok ini relatif sempit (0,25–0,5 ha) karena mereka adalah pembeli lahan. Begitu juga luas kebun karetnya berkisar 0,5–1 ha. Tidak seluas kebun karet di empat desa transmigrasi.

Adapun di Kecamatan Lempuing Jaya, untuk desa transmigrasi-nya seperti Desa Lempuing Indah, Tania Makmur, Sukajaya dan Sukamaju penduduknya adalah transmigran dari Pulau Jawa. Namun bukan dengan komoditi karet, melainkan kelapa sawit. Pemilikan kebun sawit petani kini berkisar 1–2 ha. Sementara itu, 13 desa lainnya sebagian besar adalah desa transmigrasi lokal. Di dalamnya ada tiga desa dengan penduduk asli yaitu Lubuk Seberuk, Sungai Belida, dan Rantau Durian 1, meskipun saat ini di tiga desa tersebut sudah campur baur dengan transmigrasi lokal melalui pembelian lahan dan pernikahan. Jika desa transmigrasi kebunnya ditanami dengan sawit, maka desa translok kebunnya ditanami dengan karet. Namun, saat ini luas kebun karet hanya 0,25–1 ha saja, tidak seluas kebun sawit yang merupakan jatah transmigrasi.

Baik desa transmigrasi dan translok memang diperhadapkan dengan menciutnya lahan akibat sistem waris, yakni orang tua mewariskan lahan tersebut dan dibagi-bagikan ke anaknya. Di kedua kecamatan tersebut relatif hanya 25% yang merupakan desa transmigrasi, sedangkan sisanya 75% adalah desa translok (dominan) serta desa yang awalnya dengan penduduk asli (sebagian kecil). Desa Tugu Agung dan Desa Tugumulyo (Kecamatan Lempuing), serta di Desa Lubuk Makmur dan Sungai Belida (Kecamatan Lempuing Jaya) merupakan desa yang masuk dalam program FE. Luas lahan sawah di keempat desa ini umumnya hanya 0,25–0,5 ha/KK, meskipun terdapat juga sebagian kecil lebih dari itu. Sempitnya kepemilikan lahan ini tergambar juga dengan nilai jualnya, yaitu untuk lahan 0,25 ha yang sudah jadi sawah (istilahnya sawah jadi) berkisar Rp 125–170 juta, itu pun jika ada yang menjual. Sempit dan tingginya nilai sawah di dalam desa pada dua kecamatan tersebut juga mendorong petani mengakses lahan sawah di wilayah kecamatan lain seperti Desa Tanjung Lubuk (Kecamatan Tanjung Lubuk) dan Desa Kandis (Kecamatan Pampangan), dengan nilai sekitar Rp 25 juta untuk luas lahan 0,25 ha, tetapi masih dalam kondisi semak belukar. Bahkan, terdapat petani yang mengakses lahan hingga ke Kecamatan Pedamaran Timur.

Semakin sempitnya pemilikan lahan juga disebabkan karena alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan di luar pertanian. Ini jelas

terlihat di tepi jalan utama (Lintas Timur Trans Sumatra) yang umumnya sudah berubah dari sawah menjadi pertokoan, rumah makan, penginapan, dan usaha-usaha lain (kesehatan, pendidikan, keuangan, hingga kecantikan). Kondisi seperti ini dapat menjadi konflik jika perubahan lahan tersebut dimiliki oleh orang-orang yang tidak ada keterkaitan dengan pertanian, yaitu menyebabkan semakin terpojoknya petani. Sumber konflik bisa disebabkan terputusnya saluran air ke persawahan atau tertutupnya akses jalan ke lahan garapan yang mengakibatkan petani harus memutar lebih jauh lagi.

Semakin terimpitnya luasan lahan ini juga mendorong beberapa petani dari Desa Sungai Belida dan dari Kabupaten OKU Timur membuka lahan baru seluas 800 ha di pinggiran hutan yang berlokasi di Desa Juk Dadak, Kec. Tanjung Lubuk, OKI kemudian Desa Kertabayang dan Sukananti, Kec. Rantau Alai, Ogan Ilir (lihat Gambar 9.11 dan Gambar 9.12). Beberapa KK tani juga mengantisipasi sempitnya luas lahan sawah ini dengan kerja serabutan, seperti buruh tanam padi



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.11 Penanaman Padi Sistem Legowo di Sawah Tadah Hujan



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.12 Pertanaman Padi Berlatar Belakang Kebun Karet di Sawah Tadah Hujan

dan buruh bangunan. Bahkan beberapa menjadi buruh di Perkebunan Kelapa Sawit swasta seperti PT. Tania Selatan di Desa Tania Makmur, Lempuing Jaya. Buruh tanam padi memang diperlukan terutama jika akan dilakukan tanam yang relatif serentak. Demikian juga dengan buruh bangunan, ketika banyaknya pembangunan ruko-ruko di tepi jalan lintas Sumatra atau pembangunan rumah penduduk di berbagai desa. Ada juga petani yang berusaha untuk membeli lahan dan dijadikan sawah di desa lain meskipun relatif jauh lahannya, seperti di Rantau Durian II. Juga membuka lahan untuk dijadikan kebun karet atau sawit di luar desa.

Sebenarnya di tengah impitan luasan lahan yang sempit ini, cara yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan peningkatan indeks pertanaman (IP) yang pada umumnya sudah menanam padi dengan IP 200 (dua kali tanam padi dalam satu tahun). Namun, alangkah

baiknya jika ditingkatkan lagi dengan tiga kali penanaman. Pada penanaman ketiga, dilihat terlebih dahulu potensi airnya, sehingga dapat dipilih apakah menanam padi kembali atau menanam yang lain seperti cabai, jagung, atau kacang-kacangan. Beberapa petani sudah ada yang menerapkan IP 300 dengan pola padi-padi-jagung atau padi-padi-cabai yang nilai hasilnya lebih meyakinkan dibanding menanam IP padi 300. Di Kecamatan Lempuing bahkan ada juga petani yang menanam lahan kebun dan pematang sawahnya dengan sayuran seperti kangkung, petsai, bayam, dan timun.

Sempitnya lahan memang membawa dampak pada minimnya penghasilan keluarga, yang jika tidak diatasi akan membawa mereka terjerembap di jurang kemiskinan. Kiprah ibu rumah tangga tidak kalah pentingnya dalam mengatasi sempitnya lahan ini. Terdapat contoh yang mereka lakukan seperti menanam lahan pekarangan dengan sayuran, bahkan melakukan diversifikasi usaha seperti berjualan dengan membuka warung di rumah, menjual jajanan dan makanan untuk sarapan pagi di rumah, serta membuat usaha olahan pangan seperti keripik pisang dan ubi atau makanan lain. Produk ibu rumah tangga ini dapat dijual dengan menitipkannya di kios-kios. Hal lain yang dilakukan adalah menjual ternak peliharaannya seperti ayam, itik, bahkan sapi. Ternak-ternak ini memang berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Pembuatan *krey/tirai* dari pelepah sawit juga dilakukan beberapa rumah tangga terlihat di Kecamatan Lempuing Jaya. Apabila tidak ada lagi daya upaya yang dapat mereka lakukan maka jalan terakhir adalah mereka lari ke pelepas uang. Untungnya, orang-orang yang siap membantu itu tersedia di lingkungan desa mereka.

Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya memiliki luas persawahan yang sempit walaupun telah ditetapkan sebagai lokasi FE. Berbeda dengan di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi yang juga masuk dalam program FE, tetapi pemilikan sawahnya relatif masih luas. Kondisi ini merupakan gambaran beberapa desa lainnya di Kecamatan Jejawi. Hal ini disebabkan memang wilayahnya cukup luas dibanding dengan jumlah penghuninya. Di Desa Tanjung Aur,

kepemilikan lahan sawah rata-rata seluas 2 ha, bahkan ada juga petani yang memiliki sampai 30 ha. Luas lahan karetnya rata-rata 1,5 ha dengan 30% KK memilikinya. Masih terbuka peluang besar untuk memiliki lahan sawah dan memperluasnya di dalam desa. Saat ini harga beli sawah di lebak Desa Tanjung Aur senilai Rp 25–30 juta/ha.

Meskipun pemilikan lahan masih relatif luas, tetapi produktivitas GKP masih cukup rendah, yaitu 3–3,5 t/ha. Hal ini menjadi pendorong bagi petani untuk menanam dua kali dalam satu tahun di sawah lebak pematang dan tengahan. Akan lebih baik jika produktivitas ini dapat ditingkatkan, karena dengan meningkatkan produktivitas maka dapat memperkecil risiko kegagalan baik akibat serangan hama/penyakit, banjir, ataupun kekeringan pada penanaman berikutnya. Peningkatan produktivitas padi menjadi salah satu yang dapat dilakukan dengan penggunaan varietas unggul baru. Akibat kondisi terjadinya genangan air, terutama di lebak dalam menjadi tidak efektif melakukan pemupukan. Kecuali, jika air dalam kondisi *macak-macak*. Oleh karena itu, banyak juga petani yang tidak menerapkan pemupukan, tetapi ada juga yang menggunakan pupuk cair yang disemprotkan ke daun.

Bila dilihat dari kondisi lahan sawah yang di Desa Tanjung Aur, diperkirakan sawah lebak pematang dan lebak tengahan masing-masing 40% dari luas sawah dan sisanya 20% lebak dalam. Kesulitan yang dihadapi petani adalah kondisi genangan air yang sulit diprediksi secara tepat, terutama mengenai kapan mulainya, berapa tinggi genangannya, kapan mulai air surut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Kondisi yang senantiasa tergenang air di lebak tengahan dan lebak dalam, serta terbatasnya lahan di lebak pematang, mendorong petani menggunakan persemaian terapung (Gambar 9.13). Teknologi ini merupakan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun-temurun. Terbuat dari rumput rawa dikenal dengan nama brondong (*Scleria poaeformis*) yang dianyam dengan ukuran bervariasi lebih kurang 1,5 x 3 m atau 1,5 x 2 m untuk satu persemaian. Sebagai media tumbuh benihnya digunakan ganggang air tawar (reamon) yang banyak terdapat di rawa lebak atau dikombinasikan dengan lumpur rawa



Foto: Yanter (2021)

Gambar 9.13 Persemaian Terapung di Agroekosistem Lebak

yang diletakkan di atas anyaman tadi. Persemaian ditambatkan di tonggak kayu agar tidak terbawa arus air. Persemaian terapung selalu basah sehingga persemaian tidak perlu disiram. Setelah berumur 14 hari, bibit dipersemaian ini dipindah ke darat sampai dengan air surut di sawah. Setelah air di persawahan surut, segera bibit tersebut ditanamkan. Sebagai akibat perkembangan wilayah pemukiman dan pertanian, keberadaan rumput berondong saat ini semakin terbatas di sekitar pemukiman, sehingga petani harus mencari ke tempat yang cukup jauh ke arah hutan untuk mendapatkannya.

Selain persemaian terapung itu, dikenal juga persemaian ber-tingkat. Ini dilakukan jika petani memiliki cukup lahan (tanah tidak tergenang) untuk membuat persemaian. Persemaian pertama selama 14 hari dan jika kondisi air di sawah lebak masih tinggi, maka dipindah ke persemaian kedua yang bisa mencapai 30 hari. Jika air sudah surut dan memungkinkan bibit dipindah, maka bibit ditanam di sawah (Gambar 9.14).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Foto: Yanter (2021)

Gambar 9.14 Pertanaman Padi di Lebak Tengahan

F. Bergerak Tanpa Maju (Mengetahui Permasalahan Hulu dan Hilir Sektor Pertanian)

Keberadaan petani sebagai anggota kelompok mempermudah mereka saling tukar-menukar informasi dan berbagi cara untuk mempermudah melakukan usaha tani terutama dalam pengadaan saprodi. Ketersediaan saprodi seperti pupuk urea dan phonska diperoleh melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk maksimal 2 ha lahan. Apabila petani memiliki lahan 1 ha, maka dia hanya dapat jatah untuk 1 ha. Permasalahannya, kedatangan pupuk subsidi ini sering kali terlambat dan dialokasikan sesuai kemampuan anggaran pemerintah, sehingga belum tentu usulan yang tertuang dalam RDKK bisa direalisasikan semua. Akibatnya, petani berbagi pupuk jika tidak sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat petani yang sengaja menyimpan pupuk yang diterima saat ini untuk digunakan pada musim tanam berikutnya agar pemupukan tepat waktu pada musim mendatang.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ditinjau dari kondisi lahannya, maka lahan sawah tadah hujan termasuk ke dalam lahan suboptimal, yakni tanah dengan kandungan pH yang rendah, umumnya rendah juga kandungan haranya. Terabai-kannya pengembalian bahan organik ke tanah dan intensifnya penggunaan pupuk kimia menyebabkan mutu fisik dan kimia tanah menurun. Permasalahan yang terjadi adalah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Jika jatah pupuk subsidi tidak mencukupi, maka mereka akan menambahkan sendiri dengan pembelian kontan ataupun *yarnen* (bayar setelah panen). Hal ini, jika tidak diimbangi dengan penggunaan bahan organik, justru akan merusak tanah itu. Oleh karena itu, diperlukan aktivitas yang tepat pada pengelolaan lahannya agar terjadi keberlanjutan penggunaan lahan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasinya adalah mempertahankan atau meningkatkan kesuburan lahan dengan penggunaan bahan organik. Penggunaan pupuk kandang dan pengembalian jerami padi ke lahan yang relatif saat ini berlangsung secara merata akibat cara panen yang menggunakan *combine harvester*. Penggunaan pupuk kandang menjadi kendala bagi petani karena banyak petani tidak memiliki ternak sapi. Hal tersebut yang mengakibatkan ketergantungan dengan pupuk kimia semakin tinggi.

Sesuai dengan namanya, sawah tadah hujan mengandalkan hujan sebagai sumber airnya, atau bisa juga dari sungai yang dinaikkan melalui saluran atau dari sumur bor. Penggunaan sumur bor untuk sumber air sawah di musim kemarau haruslah bergiliran antar petani karena debit air tanah yang tidak mencukupi. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan bahkan konflik dalam penggunaan air, jika seseorang merasa kebutuhan air di sawahnya belum mencukupi, sementara yang lain sudah tiba gilirannya untuk menyedot air. Di sisi lain, pada saat musim hujan, apalagi jika hujan lebat dan berhari-hari, besar kemungkinan sawah di beberapa desa (Lubuk Makmur dan Sungai Belida) di Kecamatan Lempuing Jaya akan mengalami banjir karena adanya kerusakan tanggul penahan air. Hal ini sudah sering terjadi dan menyebabkan kerusakan tanaman padi bahkan ada yang mengalami gagal panen. Kondisi ini seharusnya

lebih dahulu dibenahi apalagi jika dikaitkan dengan adanya perbaikan infrastruktur melalui program FE.

Pemanfaatan lahan rawa lebak sebagai lahan pertanian memang sangat menjanjikan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan lahan rawa yang sudah ada. Demikian pula pH tanah rawa lebak, umumnya bersifat masam sampai agak masam (pH tanah 4–5). Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi tersebut, penggunaan pembenah tanah seperti pengapuran terutama di lebak pematang dan penggunaan bahan organik seperti pengembalian jerami ke lahan, hingga penggunaan pupuk kandang dapat diterapkan sampai di lebak tengahan saat kemarau. Berdasarkan hidrotopografinya, lahan lebak dibedakan berdasarkan lama dan kedalaman genangan (Tejoyuwono, 2022), yaitu: 1) lebak pematang atau dangkal, yaitu bila lama genangannya kurang dari tiga bulan dan dalamnya kurang dari 50 cm; 2) lebak tengahan, yaitu bila lama genangannya antara 3–6 bulan dengan kedalaman 50–100 cm; dan 3) lebak dalam, yaitu bila lama genangannya lebih dari 6 bulan dan dalamnya lebih dari 100 cm. Penanaman padi biasanya dilakukan setelah air di rawa lebak pematang mulai menyusut dan selanjutnya diikuti oleh lebak tengahan dan lebak dalam.

Menurut kebiasaan, pada bulan-bulan tertentu dimulai aktivitas budidaya padi. Di lebak pematang, meskipun dapat ditanami padi dua kali, maka pada saat musim kemarau (MK) diperlukan pompanisasi. Pada MK, padi ditanam menjelang akhir musim hujan bulan Februari/Maret dengan mengharapkan sisa-sisa air hujan atau hujan yang masih turun sehingga padi dipanen bulan Juni (MK). Kemudian, pada musim hujan (MH) bulan Oktober, padi ditanam sehingga panen dilakukan pada bulan Februari. Pada saat MK, bisa saja terjadi kekurangan air di lebak pematang, maka dapat digunakan pompanisasi, jika tidak ingin mengalami kegagalan panen. Ada di antara petani yang juga menanam sayuran dan palawija di lebak pematang saat kemarau dengan pompanisasi antara bulan Juli- Oktober.

Di lebak tengahan pada MK, padi ditanam bulan Mei saat air mulai surut agar bibit tidak tenggelam sehingga dapat dipanen bulan

Agustus. Apabila pada masa penanaman atau menjelang panen bulan Juli/Agustus terjadi kekurangan air, maka saat itulah diperlukan pompanisasi. Selanjutnya, padi kembali ditanam pada bulan September saat mulai MH dan dipanen pada bulan Januari dengan kondisi air relatif tinggi sehingga panen dilakukan dengan menggunakan perahu untuk meletakkan gabahnya supaya tidak basah. Kondisi inilah yang menyebabkan petani juga enggan menanam dua kali di lebak tengahan, apalagi jika merasa panen sebelumnya sudah cukup atau lebih baik mencari pekerjaan lain. Kondisi ini pula yang menyebabkan perlunya dibuat tanggul penangkis. Sedangkan, di lebak dalam dengan kondisi air yang dalam, sawah hanya dapat ditanami padi sekali dalam satu tahun, yaitu pada saat MK. Dimulai penanaman dalam bulan Juli dan panen ketika mendekati akhir bulan Oktober.

Penggunaan saluran irigasi adalah hal yang dapat dilakukan di lebak pematang sampai lebak tengahan. Diperlukan tanggul penangkis air dan dikombinasikan dengan pintu-pintu air di muara sungai. Tanggul ini untuk memperlambat air keluar saat kemarau dan penahan air masuk dari sungai saat banjir dalam kondisi air yang masih dapat dikendalikan. Permasalahan terjadi saat MH dengan kondisi banjir besar akibat curah hujan yang tinggi dan berhari-hari, maka biasanya air juga akan memasuki sawah melampaui tingginya tanggul. Di Jejawi, sudah tiga tahun terakhir ini sering banjir, akibatnya petani juga mencari tambahan pendapatan dan beralih profesi sebagai buruh di kebun sawit.

Untuk pengolahan lahan di sawah tadah hujan, sudah relatif lebih cepat dibanding sebelumnya, namun keberadaan traktor roda empat dirasakan masih belum cukup, terutama jika dikaitkan dengan pertanaman serempak. Di lahan lebak pematang dapat digunakan traktor roda dua, sedangkan di lebak tengahan harus melihat kondisi air. Pada kondisi air yang dalam, lebih mudah bagi petani hanya dengan membalik rumput saja, apalagi di lebak dalam.

Penggunaan benih unggul padi di antara petani selama ini ketersediaanya tidak mencukupi. Meskipun di wilayah Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya bahkan di Kecamatan Jejawi tidak

begitu jauh dari Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang juga memiliki kelompok penangkar benih padi. Usaha penangkaran benih tersebut tentunya dilakukan secara komersial. Banyak hal yang menjadi dasar pemilihan varietas unggul oleh petani, seperti produktivitas yang tinggi, ketahanan terhadap hama/penyakit, umur panen, ketahanan terhadap rebah, ketahanan terhadap rendaman, ketahanan terhadap kekeringan, kesesuaian terhadap agroekosistem, harga jual berasnya, dan juga rasa nasi. Tidak cukupnya ketersediaan benih padi, biasanya mendorong petani melakukan seleksi dari hasil panen sebelumnya untuk dijadikan benih dan dipertukarkan dengan petani lain. Dengan demikian, masih sangat banyak petani yang menggunakan benih yang tidak bersertifikat padahal benih adalah faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produktivitas tanaman.

Penanggulangan hama dan penyakit (H/P) tanaman, memang menjadi bermasalah jika padi dipaksakan dengan IP 300. Bahkan di persemaian pun sudah mengalami langganan serangan sundep yang cukup berat, begitu juga di pertanaman. Saat pengisian malai terjadi, serangan beluk dengan tingkat serangan sedang hingga berat. Tidak ada pilihan lain bagi petani kecuali mengatasinya dengan penggunaan insektisida. Selain itu, hama tikus pun menjadi merajalela. Pergiliran tanaman merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di samping menanam varietas yang tahan serangan hama ini. Memang sebaiknya petani diberikan kebebasan untuk memilih tanaman pada MK. Menjadi keputusan bijak untuk tidak menanam padi tiga kali, sehingga petani dapat menyelangnya dengan sayuran atau palawija. Hal ini untuk memutus siklus hama/penyakit. Penggunaan pestisida untuk penanggulangan H/P memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penanggulangan dengan menggunakan pestisida nabati, bahkan yang dicampur dengan urine sapi adalah cara yang dapat dilakukan. Sumber informasinya dapat dengan mudah dicari melalui petugas pertanian ataupun internet. Namun, petani merasa tidak cukup waktu untuk membuatnya karena dirasakan kurang praktis. Selain itu, penanaman juga hendaknya dilakukan dalam skala yang luas, bukan hanya spot-spot saja. Memang diperlukan kekompakan petani dalam penanaman, jika hanya dilakukan spot-spot saja sedangkan

disekitarnya tidak ada, maka akan menjadi serangan hama/penyakit, apalagi jika musimnya tidak tepat.

Produksi GKP juga sering kali tidak memuaskan petani akibat gabah hampa. Hal ini dapat disebabkan serangan hama seperti walang sangit, penggerek batang, dan serangan penyakit busuk pelepah karena serangan jamur *Rhizoctonia solani* dan penyakit patah leher akibat berkembangnya jamur *Pyricularia grisea*. Cara yang paling efisien bagi petani untuk menanggulangnya adalah penggunaan insektisida/fungisida, tetapi yang menjadi permasalahan adalah petani sering kali mencampur beberapa jenis bahan kimia tersebut bahkan sampai tiga jenis, tanpa mengetahui adanya kontradiksi antara beberapa jenis bahan sehingga bisa saja menjadi tidak berguna.

Pelaksanaan panen saat ini dapat dipercepat dengan adanya *combine harvester*, petani di sawah tadah hujan tertolong dengan kecepatan alat ini dibanding harus dengan menggunakan regu panen. Di lahan lebak dengan kondisi air di lebak tengahan dan dalam, tidak mungkin dilakukan panen dengan *combine harvester* yang saat ini masih menggunakan regu panen. Petani merasa tertolong dengan tidak adanya kendala pemasaran GKP karena para pedagang besar dengan pabrik-pabrik yang di sepanjang aliran anak Sungai Musi siap menampungnya. Di satu sisi, jatuhnya harga beras saat musim panen tiba mendorong petani lebih tertarik menjual GKP karena tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya penjemuran dan penggilingan. Seperti yang terjadi, saat harga GKP Rp5.000/kg ternyata harga beras hanya Rp 8.200/kg, hal tersebut tidak ada petani yang tertarik untuk mengolahnya menjadi beras. Namun, di sisi lain hal yang tidak diperhitungkan petani adalah nilai sekam dan dedak yang tidak menjadi milik petani, melainkan milik pedagang besar. Praktik penjualan langsung GKP ke pedagang besar ini menjadikan berkurangnya secara drastis aktivitas pabrik penggilingan beras di desa. Pabrik hanya menerima beras yang digiling untuk makan sehari-hari saja. Selain itu, kualitas beras yang dihasilkan oleh beberapa pabrik di dalam desa dengan mesin yang sudah tua tidak begitu baik dibanding dengan pabrik besar dengan mesin yang relatif modern dan lengkap. Belum lagi jika dilengkapi perhitungan biaya penjemuran oleh petani dan rendahnya

harga jual beras. Apalagi jika petani harus segera mengolah lahan sawahnya untuk ditanami ulang, sehingga lebih praktis bagi petani yang menjual GKP.

Dikaitkan dengan usaha tani padi, aktivitas pasca panen (hilirisasi) di tingkat petani saat ini sangat terbatas. Pengolahan gabah menjadi berbagai macam kualitas beras dilakukan di tingkat pabrik besar, begitu juga dengan pembuatan tepung beras. Di tingkat petani yang dapat dibuat adalah pengolahan sekam menjadi arang sekam dan pembuatan pelet makanan ikan dari dedak. Namun, saat ini yang tersisa di petani hanya gabah untuk beras konsumsi saja. Artinya, bahan bakunya minim sekali.

Seperti pada umumnya petani kecil, dengan latar belakang pendidikan formal yang relatif rendah, diperlukan aktivitas penyuluhan untuk mendiseminasikan inovasi teknologi, bahkan memerlukan upaya pendampingan agar dilakukan dengan benar dan berlanjut. Di beberapa lokasi memang sudah pernah dilakukan sekolah lapang, baik sekolah lapang penanggulangan hama penyakit terpadu, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi. Namun, tentu sangat terbatas pada peserta dan pelaksanaannya. Mungkin juga informasi yang mereka terima tidak didiseminasikan ke petani lain.

Modal menjadi salah satu masalah yang pelik bagi petani untuk dapat menerapkan teknologi baru, karena teknologi baru umumnya diikuti persyaratan yang lebih berat. Hal ini juga berlaku di sektor pertanian seperti penggunaan varietas unggul dan perlakuan benihnya, persyaratan pengolahan tanah, pemupukan, dan ditambah lagi penyiangan serta penanggulangan H/P yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensinya adalah adanya tambahan modal yang cukup besar dan modal merupakan salah satu masalah pokok yang belum terpecahkan oleh sebagian besar petani.

Dahulu di saat harga karet melambung tinggi, sedangkan petani menanam padi hanya satu kali dalam satu tahun, tidak sedikit sawah tadah hujan dialihfungsikan menjadi kebun karet. Padahal, lahan tersebut memang sengaja dicetak menjadi sawah. Hal yang tidak

dipertimbangkan oleh petani betapa biaya yang tidak kecil untuk mencetak sawah itu beralih ke penggunaan lain. Memang padi masih bisa juga ditanam di sela-selanya sampai dengan dua tahun pertanaman karet, namun tentu hasilnya yang berbeda dibanding pada hamparan terbuka. Saat ini, ketika pertanaman di lahan sawah tadah hujan dapat ditanami tiga kali dalam satu tahun dengan berbagai pola tanamnya dan harga karet terpuruk, tidak sedikit juga petani yang menebang karetnya dan mengembalikan lahannya ke fungsi semula sebagai sawah tadah hujan.

G. Kegagapan Petani dalam Merespons Kebijakan dan Program Pertanian Berkelanjutan

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghentikan penyebaran wabah COVID-19 berakibat terganggunya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan pangan dalam kondisi menjadi terbatas atau berhenti. Kondisi akses dan ketersediaan bahan pangan yang terganggu ini dapat menimbulkan gejolak, bukan saja di bidang kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengembangkan program FE.

Sebagai suatu usaha pertanian skala luas, konsep pengembangan FE adalah: 1) peningkatan infrastruktur; 2) peningkatan produksi, produktivitas, dan indeks pertanaman; 3) diversifikasi produksi (multi-komoditas); 4) hilirisasi produk pertanian; 5) integrasi hulu-hilir; 6) teknologi modern dan sistem digitalisasi; dan 7) korporasi petani. (Kementerian Pertanian. 2020). Dalam Pengembangan FE tersebut dilakukan pendekatan: 1) pengembangan klaster; 2) integrasi sektor dan sub sektor; 3) pemberdayaan masyarakat; dan 4) lingkungan berkelanjutan.

Sebagai wujud dari program pertanian berkelanjutan, FE diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat, saat ini dan mendatang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dari kegiatan pertanian pangan. Dengan demikian kepastian produksi pangan berkelanjutan dalam jangka panjang menjadi pertim-

bangunan utama. Program FE ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, seperti program intensifikasi pada kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan program ekstensifikasi pada kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH). Program ini pun diharapkan tetap berkelanjutan walaupun dengan penyempurnaan ke depan. Melalui program SERASI, secara ringkas ada dua target yang akan dicapai, yaitu peningkatan indeks pertanaman (IP Padi 200–300%) dan pengembangan korporasi dengan pendekatan kawasan. Adapun melalui kegiatan OPLAH dilakukan upaya peningkatan IP padi dan produktivitas dengan kegiatan berupa perbaikan tanggul, saluran irigasi, pintu air, pompanisasi dan pembuatan/perbaikan jembatan.

Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, jelas terjadi keterlibatan sektor seperti perbaikan pintu air, saluran irigasi, pembuatan/perbaikan jalan dan jembatan. Keterkaitan subsektor pada program FE terlihat dengan adanya multikomoditas yang diusahakan. Meskipun di suatu kawasan dengan basis komoditi misalnya padi, maka ada beberapa komoditas pendukungnya (hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

Satu Kawasan FE luasnya 10.000 ha, yang terdiri dari 2–5 klaster (1 klaster berkisar 2.000–5.000 ha). Secara berjenjang, di tingkat desa petani melakukan aktivitas budi daya sampai dengan panen/pasca-panen dengan menerapkan inovasi teknologi secara berkelanjutan. Di tingkat klaster seharusnya sudah ada usaha bersama gapoktan dalam wujud Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang didalamnya mengintegrasikan UPJA, layanan saprodi, unit pemasaran dan RMU (jika padi). Selanjutnya, pada tingkat kawasan, maka korporasi (dalam bentuk PT) mengkoordinir usaha penyediaan saprodi, pengolahan hasil (diversifikasi), dan unit keuangan.

Gaung program ini didengar oleh ketua-ketua kelompok tani dan petugas yang ikut saat pertemuan, tetapi memang kurang tersosialisasi ke anggota kelompoknya. Seperti beberapa anggota yang merasa tidak mengerti apa bentuk kegiatannya dan mengatakan bahwa semuanya ditentukan dari atas, bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang FE tersebut. Beraktivitas di sawah sudah

merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Peningkatan IP sudah terjadi berkat upaya yang dilakukan dan ketersediaan sarana prasarana di samping memang merupakan tuntutan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Dari tahun ke tahun peningkatan produktivitas diupayakan melalui intensifikasi di lahan yang sudah ada dan sebagian lagi melakukan budidaya di lahan sawah bukaan baru.

Petani biasanya akan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan jika disampaikan dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan keberpihakan pada petani. Menjangkau dan merealisasikan program baru adalah hal yang benar, tetapi untuk kelancarannya maka akar masalahnya harus diatasi dan diselesaikan dahulu. Membentuk korporasi untuk mengkonsolidasikan usaha tani perorangan tersebut sebagai upaya mengatasi sempitnya lahan adalah upaya yang mulia tetapi tidak gampang.

Beranjak dari fakta potensi lahan, air dan iklim, kondisi infrastruktur, kondisi eksisting bisnis di lokasi petani saat ini, kondisi sosial dan budayanya, bukanlah hal mudah untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan kawasan 10.000 ha tersebut, hanya di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya yang sudah terwujud karena adanya keseragaman agroekosistem setempat (tadah hujan). Meskipun baru sebagian yang menanam padi tiga kali dalam satu tahun, tetapi pada dasarnya menyelingi padi dengan pilihan tanaman hortikultura, jagung atau palawija lainnya adalah lebih baik, selain mengurangi serangan H/P padi, juga mewujudkan diversifikasi komoditas, karena di FE selain komoditas utama, dikenal juga komoditas pendukung.

Di wilayah lain terutama rawa lebak dalam akan sulit mewujudkannya karena kendala sumber daya alam terutama air (banjir), yang hanya dapat ditanami padi satu kali dalam satu tahun jika kemarau tiba. Sementara itu, di lebak pematang meskipun dapat ditanami padi dua kali dalam satu tahun akan membutuhkan pengairan (pompa) saat kemarau, begitu juga di lebak tengahan yang dapat ditanami padi dua kali dalam satu tahun. Surutnya air akan dimulai dari lebak pematang, berlanjut ke lebak tengahan dan akhirnya ke lebak dalam. Oleh karena itu, penanaman padi tidak mungkin bisa serentak di kawasan

lebak. Sangat besar kemungkinan pada satu kawasan seluas 10.000 ha tersebut didapati tiga tipologi lembak. Oleh karena itu, wujud kawasan lembak yang seragam sulit didapat. Inilah yang terjadi untuk wilayah Kecamatan Jejawi dan Pampangan. Sementara itu, pada FE harus ada keberlanjutan supaya ada aktifitas dan terjadi efisiensi penggunaan alsintan (tidak *idle*).

Di tingkat klaster sudah ada penggilingan beras yang dapat mengolah sampai beras medium, terdapat kios saprodi, dan pedagang pengumpul hasil. Beberapa petani memiliki alat pengolahan lahan seperti traktor roda dua, bahkan roda empat, dan alat panen *combine harvester*. Penggunaan alsintan ini memang berkembang, didukung dengan ketersediaan bengkel, meskipun bukan bengkel khusus alsintan, bahkan dapat memanggil teknisi jika ada kerusakan alat. Dengan kewenangan dan keleluasaannya sendiri dalam mengelola asetnya dan dapat menikmati hasil dari jerih payahnya, tentu juga melibatkan orang lain untuk bekerja sebagai operator, akan tidak mudah bagi petani menginvestasikan alatnya, mengintegrasikan dalam suatu BUMS kecuali jika ada keuntungan yang lebih besar.

Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan berakibat banyak bidang pelayanan tidak dapat ditangani pemerintah secara maksimal, sehingga sektor swasta/privat ikut dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Di sektor pertanian, salah satunya melalui upaya pembentukan korporasi petani di program FE padi ini. Korporasi petani dibuat oleh petani dari petani dan untuk petani. Sehingga, modalnya sebagian besar (>50% adalah milik petani). Mereka keberatan jika harus mengalokasikan simpanan dari kelompok atau gapoktan untuk pendanaan korporasi karena simpanan masing-masing kelompok/gapoktan berbeda-beda, kecuali jika ditentukan nilai simpanan tiap ha sama, jadi simpanan petani tergantung dari besar kecil lahan saja. Menjadi permasalahan selanjutnya tentang bagaimana kemampuan petani dengan kepemilikan lahan yang hanya 0,25–0,5 ha tersebut. Untuk modal usaha saja mereka harus meminjam, ditambah lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk

mewujudkan dana dari petani yang > 50% saja sulit dilakukan petani dengan kepemilikan lahan yang sempit itu. Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya selain menghimpun dana dari masing-masing petani berdasarkan luas lahannya adalah suntikan dana dari pemerintah agar tersedia dana yang > 50% dan sisanya dipenuhi oleh investor swasta/privat.

Aktivitas pemasaran GKP tidaklah mengalami kesulitan saat ini, karena *off taker* seperti pedagang besar dengan pabrik besar lengkap dengan peralatan modern tersedia. Aktivitas diversifikasi produk bisa dilakukan oleh perusahaan swasta perorangan tersebut yang keberadaannya di luar kawasan FE. Tentu ini bukanlah konsep FE. Pada konsep FE, perusahaan korporasi adalah milik bersama petani (bisa perpaduan dari beberapa gapoktan), dan berada di kawasan FE dengan aktivitas melakukan usaha saprodi/alsintan, diversifikasi produk olahan, serta dilengkapi dengan layanan unit keuangan.

H. Produk, Mata Rantai dan Pengelolaan Pasca Panen: Mengurai Jejak Kejayaan dan Keterbatasan Petani

Hasil utama dari padi yang paling dihargai adalah gabah yang diolah menjadi beras, dengan hasil samping tanaman padi seperti jerami, sekam, dedak, dan ikutan lain seperti bekatul dan menir. Jerami padi biasanya dikembalikan ke lahan sebagai pelengkap bahan organik tanah dan juga dijadikan pakan ternak sapi bagi yang memilikinya. Baik dalam bentuk segar, layu, atau sudah difermentasi. Sekam dapat digunakan untuk bahan pencampur media tanam setelah terlebih dahulu diarrangkan. Beberapa penggilingan yang memiliki mesin pengering, juga memanfaatkan sekam untuk bahan bakarnya, arang sekamnya dikembalikan ke lahan sebagai bahan pembenah tanah yang dapat meningkatkan pH tanah. Penjual tanaman hias mencampurnya tanpa diarrangkan untuk media tanam. Dedak dijual untuk makanan unggas, ternak kecil, dan besar. Sedangkan, bekatul dan menir diuangkan oleh pabrik besar karena dapat diproses lagi untuk dijadikan bahan makanan yang bergizi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Penjemuran gabah (Gambar 9.15) dan penggilingan beras (Gambar 9.16) di desa umumnya menghasilkan beras asalan, meskipun ada beberapa yang mampu menghasilkan beras kualitas medium karena mereka dapat menyetel mesin pemoles untuk mendapatkan beras medium. Dari mesin pemecah akan keluar beras pecah kulit yang selanjutnya dimasukkan ke mesin pemoles untuk menghasilkan beras dan hasil samping dedak. Untuk mendistribusikan beras kualitas medium ini mereka juga melakukan *packing* sendiri agar terasa nilai tambahnya. Melalui proses ini maka sekam dan dedak masih tinggal sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga desa.

Beras asalan lebih suka dibeli pabrik beras besar dari penggilingan di desa dengan harga yang dibuat tidak begitu beda selisihnya dengan beras medium yang belum dikemas. Ini dilakukan agar penggilingan di desa lebih tertarik menjual beras asalan dan mereka juga tidak perlu memproses lebih lanjut mengeringkannya, menyetel alat. Oleh pedagang beras besar di pabriknya, maka beras asalan tersebut dipro-



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.15 Penjemuran Gabah untuk Konsumsi di Agroekosistem Lebak



Foto: Yanter (2023)

Gambar 9.16 Penggilingan dengan Hasil Beras Medium di Kec. Lempuing Jaya

ses lagi. Beras asalan sendiri dengan klasifikasi dari yang terburuk adalah beras batik, sinar, dan beras putih masing-masing jenis tersebut ada juga beras utuh dan pecahnya. Beras asalan ini dimasukkan ke mesin pemoles menjadi beras putih dan produk sampingannya adalah bekatul dan menir.

Pedagang besar/pabrik besar beras, bahkan lebih senang lagi membeli GKP dari sawah karena dengan fasilitas yang dimiliki mereka yang berada di aliran anak Sungai Musi tersebut dapat mengeringkan kembali dengan menjemur atau menggunakan *bed dryer/vertical dryer*. Selain tentunya mereka juga memiliki mesin pemoles (*polisher*). Beras putih diayak (*grading*) untuk memisahkan beras kepala dan pecah, bahkan ada juga mesin pemisah warna (*color shortage*) berupa pendeteksian warna oleh sensor sehingga beras yang sudah dipoles dan berwarna mendekati seragam yaitu putih bening tadi dapat terpisah dari butiran warna lain. Cara yang dilakukan ini

Buku ini tidak diperjualbelikan.

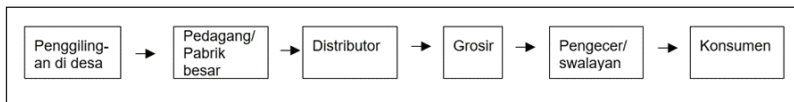
dapat menghasilkan beras dengan beberapa kualitas dari medium sampai dengan premium. Beras dikemas dengan pilihan berbagai karung plastik dengan berbagai macam merk yang dilengkapi dengan keterangan derajat sosoh, kadar air, dan butir patahnya. Pabrik/pedagang beras besar inipun mendapat sekam, dedak, bekatul, dan menir sebagai hasil ikutan dari pembelian GKP petani.

Meskipun dalam jumlah kecil karena GKP sebagian besar sudah diambil oleh pedagang besar/pabrik, namun saat musim panen masih terjadi distribusi beras dari penggilingan di desa ke konsumen akhir dengan rantai terpendek adalah dari penggilingan di desa. Beras medium tersebut dibawa oleh distributor untuk dipasarkan ke konsumen yang ada di wilayah kecamatan/desa lain, terutama ke para pekebun yang tidak memiliki sawah (Gambar 9.17).



Gambar 9.17 Rantai Terpendek Distribusi Beras

Adapun yang merupakan pemasaran terpanjang (Gambar 9.18) adalah dari penggilingan di desa, beras asalan dibeli oleh pedagang atau pabrik besar dari Palembang untuk diolah kembali menjadi beras medium atau premium, kemudian dibawa distributor untuk dijual ke grosir, selanjutnya dari grosir ke pengecer/swalayan sebelum dibeli konsumen.



Gambar 9.18 Rantai Terpanjang Distribusi Beras

Beras-beras hasil penggilingan di wilayah Lempuing dan Lempuing Jaya ada juga yang dipasarkan ke luar provinsi yaitu ke Provinsi Lampung, karena kedekatan wilayahnya. Inovasi teknologi untuk mengolah jerami menjadi pakan ternak, membuat arang sekam, dan membuat pakan ikan dari dedak, informasi cara pembuatannya juga tersedia, demikian juga alsintan untuk pembuatannya. Namun, aktivitas yang terjadi di tingkat petani pada umumnya sekam digunakan untuk membakar batu bata, dedak digunakan untuk pakan ternak baik ternak besar maupun unggas. Ada beberapa petani yang sudah membuat fermentasi pakan ternak menggunakan dedak, rumput alam, dan jerami.

Untuk menghasilkan beras berkualitas dengan pengisian bulir penuh, pemasakan maksimal, kadar air memenuhi standar, mengkilap, dan bersih maka perbaikan manajemen produksi harus dimulai dari tingkat petani. Penggunaan benih yang baik dengan aspek budidaya yang benar, tentu harus didukung dengan ketersediaan input. Dilanjutkan dengan fasilitas penggilingan yang mampu untuk memprosesnya sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk melakukan budidaya yang benar di tingkat *on farm*, jelas petani sebagai orang yang sudah turun temurun membudidayakannya dapat melakukannya dengan baik, asalkan fasilitas seperti infrastruktur pengairan diperbaiki dan ketersediaan input terpenuhi. Apalagi didukung dengan kemudahan memperoleh inovasi teknologinya, baik melalui pertemuan dalam kelompok tani, petugas, dan lembaga pertanian. Namun, yang dirasakan menjadi kelemahan dan keterbatasan yang melekat pada petani adalah kepemilikan lahan yang sempit, menyebabkan penggunaan input produksi itu menjadi tidak efisien. Adanya tuntutan IP padi 300 juga sulit memutus siklus H/P meskipun didukung dengan ketersediaan pestisida. Selain cara tersebut tidak sesuai dengan konsep pengendalian H/P terpadu yang menganjurkan upaya pergiliran tanaman.

Peningkatan menjadi IP padi 200 tidaklah terjadi serentak, di wilayah Lempuing/Lempuing Jaya mulai terjadi di tahun 2010. Pada 3 tahun belakangan ini diperkirakan 85% petani sudah menerapkan

pola IP 300, di antaranya 65% justru menerapkan IP padi 300 dan sisa 20% menanam tanaman hortikultura atau palawija setelah padi untuk menjadi IP 300. Fenomena yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang, di saat tibanya musim panen maka harga beras jatuh. Dahulu, mau tidak mau petani menjual beras karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membayar hutang. Gabah hasil penjemuran yang disimpan hanya untuk beras konsumsi saja.

Sejak tahun 2015 mulai marak penjualan GKP ke pedagang/pabrik beras besar melalui orang-orangnya yang datang sampai ke sawah untuk mengangkut gabah. Hal ini disambut baik petani karena dalam hitungan mereka ternyata menjual GKP lebih menguntungkan dibanding menjual beras. Pemasaran GKP inipun tanpa kendala, meskipun mereka menyadari bahwa dengan menjual GKP maka sekam dan dedak menjadi bagian keuntungan pedagang/pabrik besar. Namun, disisi lain jika mereka menggilingkannya menjadi beras, harganya tidak menarik bagi petani dan harus mengeluarkan biaya lagi untuk proses penjemurannya. Penjemuran (lihat Gambar 14) ini tentu memakan waktu, sementara mereka harus segera melakukan persiapan lahan untuk penanaman berikutnya.

I. *Life Story*: Membaca Perjalanan Keluarga Petani di Tanah Leluhur

Pak Sutoyo adalah sekretaris Kelompok Tani Cipta Makmur, anak ketujuh dari delapan bersaudara ini berusia 38 tahun. Beliau lahir di Belitang, OKU Timur dan berpendidikan SMP. Kedua orang tuanya berasal dari Pulau Jawa. Bapakny dari Pati dan ibunya asal Kebumen yang bertransmigrasi ke OKU (Belitang) pada tahun 1965. Istri Pak Sutoyo bernama Nur Aisyah, juga dari etnis Jawa, yang sudah lahir di Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing pada tahun 1992. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih duduk dibangku sekolah dasar. Di Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing ini, mereka tinggal di rumah berukuran relatif besar, berukuran 7 x 18 m yang permanen untuk tiga penghuninya, bahkan rumah ini sudah berlantai

granit. Ternyata, Pak Sutoyo mulai serius menggeluti bidang pertanian sejak berkeluarga 10 tahun lalu. Menjadi petani terutama petani padi adalah pilihannya karena lingkungan tempat tinggalnya yang sesuai.

Bersama-sama dengan istrinya, berdua mereka mengelola lahan sawah yang luasnya satu ha dan dapat ditanami dua kali dalam satu tahun. Sawah tersebut terakhir ditanami padi varietas Ciliwung, yang memberikan hasil panen GKP sebanyak 6 ton/ha. Selain ditanami padi, lahan sawah tersebut juga ditanami dengan cabai dan sayuran di pematangannya, meskipun hanya dikonsumsi sendiri. Mereka juga memelihara sapi tiga ekor, ayam 15 ekor, dan itik empat ekor. Ternak yang diusahakan ini merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual. Namun, diakui dari apa yang diusahakan tersebut hasil dari padi tetaplah lebih besar. Selain itu, jika hanya menggantungkan hidup di sektor pertanian saja, maka apa yang diperoleh tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Oleh karena itu, dia juga memiliki pekerjaan serabutan lainnya, seperti menjadi buruh tani, operator traktor roda dua dan roda empat, serta *ngomben* (istilah untuk operator *combine harvester*). Bahkan di saat akan dimintai keterangannya, ternyata Pak Sutoyo baru saja pulang dari aktivitasnya sebagai buruh bangunan. Di rumahnya selain tersimpan kendaraan bermotor roda dua, juga traktor tangan satu unit. Dia mengungkapkan bahwa jika tidak memiliki pekerjaan serabutan lainnya itu, maka tidak akan bisa juga pendapatan dari sawah menutupi kebutuhan hidup keluarganya.

Meskipun mereka tinggal di perdesaan, Bu Nur Aisyah ternyata tidak turut aktif terjun ke sawah. “Sebenarnya saya ingin juga membantu ke sawah,” ungkapnya. Namun, suaminya meminta agar ia fokus saja mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain kebutuhan keluarga. Bahkan suaminya juga kerap membantu Nur menyelesaikan pekerjaan rumah tangga jika ada beberapa yang belum kelar saat dia tiba di rumah.

Pak Rusman Nadi, seorang petani padi di Desa Tugu Mulyo, Lempuing. Pria yang lahir di Belitang OKU Timur ini, kini berusia 35 tahun. Anak ketiga dari empat bersaudara ini berhasil menyelesaikan

pendidikan sarjana pertaniannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang tahun 2016 yang lalu. Kedua orang tuanya berasal dari Pulau Jawa, ayahnya dari Malang dan ibunya asal Yogyakarta yang ikut bertransmigrasi bersama orang tua mereka masing-masing ke OKU pada tahun 1965. Istri Pak Rusman saat ini berusia 33 tahun, lahir di Tugu Mulyo, Lempuing. Orang tuanya juga berasal dari Jawa. Sebagai ibu rumah tangga, dia senantiasa mendukung usaha suaminya bekerja di bidang pertanian. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki yang besar sudah duduk di kelas dua madrasah tsanawiyah (SMP), sedangkan anak keduanya belum bersekolah. Sejak berkeluarga pada tahun 2009, dia sudah terjun ke sawah. Salah satu alasannya adalah karena ia merasa memiliki kemampuan di bidang pertanian, sekaligus juga melanjutkan usaha orang tuanya. Selain menjadi anggota kelompok tani, dia juga merupakan tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang wilayah binaannya di Tugu Mulyo, Lempuing. Sebelumnya dia juga pernah berjualan pestisida dan juga jualan sayur di pasar.

Selain memiliki sawah 1 ha, mereka juga memiliki lahan sawah 0,5 ha di Kabupaten Banyuasin yang disewa orang, kebun karet di OKU Timur seluas 1,5 ha. Bahkan ada juga lahan milik mereka yang belum dibuka seluas 0,75 ha di pinggiran kawasan hutan. Keluarga Pak Rusman pun memiliki dua ekor sapi, 30 ekor ayam, dan lima ekor itik. Aktivitas memelihara ternak ini merupakan kegiatan yang menyenangkannya.

Di rumahnya yang permanen berukuran 7 x 23 m tersebut dia memiliki kendaraan dua unit kendaraan roda dua dan 1 unit traktor tangan. Seperti yang diungkapkannya, dari 1 ha lahan sawah tersebut dengan ditanami padi MR 219 hanya menghasilkan GKP 6,5 t/ha. Padahal potensi hasilnya dapat mencapai 13 t/ha dengan rata-rata produktivitas 9 t/ha. Senjang hasil ini disebabkan adanya serangan sundep.

Bu Sulastri menambahkan bahwa kiprah suaminya bidang pertanian ini tergolong luar biasa, karena sebagai seorang petani dia pernah mengajak petani lain untuk bertanam dua kali dalam satu

tahun. Walaupun tidak mudah, dia nekat tetap menanamnya meski dengan risiko yang sudah diyakini akan habis terserang tikus karena dia berani tampil sendiri yang ditanam pada tahun 2009 waktu itu. Sengaja bertanam dengan sistem hambur benih saja agar tidak keluar biaya terlalu besar. Kenyataan kegagalan itu memang terjadi. Namun, dia tidak berputus asa dan tetap berupaya mengajak petani lain pada tahun-tahun berikutnya untuk bertanam padi dua kali satu tahun agar hidup layak. Saat ini semua petani di wilayahnya semua sudah bertanam padi dua kali dalam satu tahun dan banyak juga yang menerapkan sistem tanam legowo, ungkap Bu Sulastri.

Dari Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya, ada juga cerita menarik dari Pak Amrin yang saat ini berusia 55 tahun, dia bukan lahir di Lempuing Jaya, melainkan lahir di Desa Sumber Harjo Belitang, yang sekarang sudah menjadi Kabupaten OKU Timur. Anak ketiga dari empat bersaudara ini pendidikan terakhirnya SMA. Orang tuanya adalah transmigran dari Jawa Tengah ke Belitang pada tahun 1957. Bapaknya asli Cilacap, sedangkan ibunya Keroya, Jawa Tengah. Istri Pak Amrin bernama Bu Amintri, juga lahir di Desa Sumber Harjo Belitang. Hanya beda RT saja rumah mereka. Saat ini Bu Amintri berusia 42 tahun. Mereka berumah tangga pada tahun 1989 lalu, dan memiliki satu orang anak laki-laki sebagai anak pertamanya dan yang kedua adalah perempuan. Anak laki-laknya lahir pada tahun 1990 dan sudah berkeluarga. Dari anak laki-laki ini, dia sudah dikaruniai seorang cucu laki-laki. Anak perempuannya masih bersekolah di madrasah aliyah (SMA). Anaknya yang berkeluarga itu sudah tinggal di rumah sendiri, yang dulu dibangun Pak Amrin di samping rumahnya.

Sejak menikah tahun 1989, Pak Amrin sudah jadi petani. Namun, saat itu dia masih menyewa lahan saja dan merangkap menjadi buruh tani. Pada tahun 1993 keluarga ini pindah dari Desa Sumber Harjo Belitang OKU Timur ke Desa Lubuk Makmur Lempuing OKI. Pada tahun 2000 mereka baru memiliki lahan pribadi seluas 0,5 ha yang saat itu dibeli dengan harga Rp 2,5 juta, namun waktu itu masih belum dicetak menjadi sawah. Lahan itulah yang dipertahankan untuk ditanami sampai saat ini.

Saat ini, sehari-hari dia juga sebagai ketua Kelompok Tani Makmur Sentosa dan sekretaris Gapoktan Mukti Makmur. Dahulu bahkan pernah menjadi kepala urusan umum di kantor desa, sekarang tidak lagi dan sudah diganti dengan tenaga muda yang lebih gesit ungkapnyanya. Ternyata Pak Amrin pun adalah mitra BPS, yang pada tahun 2010 ikut mencacah pada sensus penduduk, tahun 2013 dalam sensus pertanian, tahun 2016 ikut juga mencacah di sensus ekonomi. Tidak heran jika anak pertamanya juga mengikuti jejaknya menjadi mitra BPS sebagai petugas pencacah lapangan (PPL) pada ST2023 ini. Jika dahulu banyak aktivitasnya di pemerintahan, tetapi saat ini murni dia menyibukkan dirinya sebagai petani dan mengurus petani dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Di lahan sawah, dia juga mengusahakan kacang hijau, yang ditanamnya di tepi siring air hanya untuk konsumsi keluarga saja. Selain itu, dia juga memiliki lima ekor sapi, 15 ekor ayam, delapan ekor mentok, dan sembilan ekor bebek. Namun, diakuinya dalam hitungan satu tahun tetap saja penghasilan dari padi lebih besar dibanding sumber lainnya. Di rumahnya yang berukuran 6 x 10 m yang dibangunnya permanen itu dia juga memiliki 1 unit kendaraan roda dua. “Sebagai seorang istri, saya mendukung suami dengan turut aktif ke sawah, bahkan di pekarangan rumahpun kami tetap bercocok tanam,” ungkap Bu Amintri.

Agar menjadi perhatian pemerintah, Pak Amrin berkisah bahwa dahulu pernah terjadi gagal panen akibat banjir di areal persawahan Desa Lubuk Makmur ini. Tanggul yang ada jebol dan Sungai Lempuing meluap. Sampai saat ini tanggul tersebut belum diperbaiki. Tidak heran jika lahan sawah di desa ini sering mengalami banjir. Memang diperlukan dana yang tidak kecil, “bahkan akan mencapai milyaran untuk memperbaikinya,” ungkapnyanya. Dia sudah menyampaikan hal ini kepada aparat di kecamatan bahkan kabupaten pada saat pertemuan-pertemuan. Akibat gagal panen waktu itu karena banjir Pak Amrin terpaksa harus menjual dua ekor sapi untuk menyambung hidup keluarganya.

Dari Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya ada seorang petani yang visioner. Dia bernama Ruwiyo, berusia 46 tahun. Asalnya dari Kebumen Jawa Tengah. Saat berumur empat tahun, dia dibawa orang tuanya ke Belitang, OKU Timur. Anak kedua dari lima bersaudara ini mengaku hanya tamat SMP, walaupun kemudian dia juga ikut ujian persamaan paket C sehingga memiliki ijazah SMA. Istrinya juga dari etnis Jawa, bernama Siti Rohima yang lahir di Belitang 38 tahun lalu. Mereka berkeluarga pada tahun 2001. Saat ini, mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Anak pertama kuliah di Kota Kediri, Jawa Timur dan yang kedua masih duduk di kelas 5 SD. Saat ini, ayahnya tinggal bersama mereka.

Pengalamannya sebagai petani dimulai sejak menikah. Alasannya ingin jadi petani karena paling tenang jadi petani itu, yang penting punya lahan sawah saja, tetapi paling tidak harus 2 ha. Artinya, Pak Ruwiyo sudah memiliki hitung-hitungan bahwa jika hanya memiliki sawah, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, minimal harus memiliki 2 ha lahan sawah. Saat ini, statusnya masih juga sebagai ketua Gapoktan Sumber Rejeki, walaupun dia sudah menginginkan untuk diganti karena kesibukannya dalam memperluas usahanya di lokasi lain. Bahkan dia juga pernah menjadi Kepala Dusun 2.

Dulu mereka pernah memiliki kebun karet seluas 2,25 ha, tetapi kebun tersebut sudah dijualnya. Menurut pengakuan Bu Siti, kebun tersebut dijual karena merasa sering dibohongi oleh tukang sadapnya. Di dalam desa ini dia memiliki sawah seluas 2,5 ha yang sejak tahun 2013 ditanami dengan pola padi-cabai-padi. Hasil dari cabai sangat memuaskannya, sehingga pola itu terus dia pertahankan. Selain mengusahakan padi di Desa Sungai Belida seluas 2,5 ha, di luar desa yaitu Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten OKI dia memiliki sawah seluas 10 ha yang ditanami padi dua kali dalam satu tahun. Walaupun tidak banyak, dia juga memelihara 10 ekor ayam dan 11 ekor bebek, tambah Bu Siti.

Pak Ruwiyo memiliki pabrik beras dengan mesin lama Agrindo *double pass*. Penggilingannya juga dilengkapi dengan mesin pemoles

(*polisher*), *color shortage*, dan mesin jahit karung. Tidak heran jika dia mampu menjual beras medium. Kelompoknya juga mendapat bantuan mesin *vertical dryer* tahun 2013 dari pemerintah yang berkapasitas 4 t GKP dikeringkan selama 12 jam. Juga *bed dryer* berbahan bakar kayu dengan kapasitas GKP 10 t dengan waktu pengeringan 24 jam.

Di rumahnya yang berukuran 12 x 6 m, dia memiliki dua unit kendaraan roda dua, dan satu unit mobil L 300. Pak Ruwiyo juga memiliki traktor roda empat (merk *John Deere*). Dari lahan sawahnya di Desa Sungai Belida tersebut hasil padi Inpari 23 yang ditanam pada MH menghasilkan GKP 8 t/ha, sementara pada MK 6 t/ha.

Menariknya, sejak tahun 2015 lalu dia bersama kelompoknya yang berjumlah 100 KK yang berasal dari Sungai Belida dan Belitang (OKU Timur) membuka lahan seluas 800 ha untuk pertanaman padi yang merupakan hamparan mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten OKI dan Ogan Ilir (OI). Lokasinya di Desa Juk Dadak, Kecamatan Tanjung Lubuk, OKI, kemudian Desa Kertabayang dan Sukananti, Kecamatan Rantau Alai, OI. Diinformasikan oleh pak Ruwiyo bahwa saat ini kawasan seluas 800 ha tersebut sudah ditanam padi dengan IP 200.

Pak Ruwiyo juga pernah mengelola penangkaran benih padi, tetapi tidak berlanjut karena pembayarannya macet, bahkan macetnya sampai satu tahun. Oleh karena itu, dia menjalankan usaha pabrik beras saja. Saat ini, di musim panen, pabriknya masih mengolah GKP 10 t/hari paling tidak selama 1,5 bulan. Sementara itu di luar musim panen, dalam satu minggu masih dapat diolah GKP 10 t. Beras dijual ke pedagang di Palembang dan juga BULOG. Pabrik beras yang dikelolanya ini dipercaya mengisi gudang BULOG sebanyak 900 t beras pada tahun 2020 dan tahun 2023 ini hanya 300 ton beras saja.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia dapat merasakan kesulitan yang dirasakan petani lainnya terutama dalam mengelola keuangan. “Keluhan kami sebagai petani cukup banyak Pak” kata Bu Siti Rohima. “Di antaranya untuk mengolah lahan kami memerlukan bahan bakar, tetapi kami tidak boleh membelinya menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal kendaraan

truk banyak yang mengantre untuk mendapatkannya, sehingga kami harus membeli dengan harga yang lebih mahal di pengecer-pengecer” sambungnya. Anehnya pengecer tersebut membelinya di SPBU ada juga menggunakan jeriken. Harusnya orang-orang seperti Siti inilah yang dibantu dalam membuka lahan sawah, karena apa yang mereka wujudkan adalah wilayah-wilayah baru sebagai lumbung pangan.

Ketika disinggung mengenai mekanisme penjualan, yang saat ini cenderung dimonopoli pihak tertentu (monopsoni) dengan membeli GKP, di mana bukan hanya beras yang diperolehnya melainkan juga sekam dan dedak, Pak Ruwiyono pun menanggapi, “Kalau tidak ada B....g, justru petani itu akan mengalami kesulitan dalam menjual padinya. Itu pendapat saya pribadi pak.” Jawaban tersebut memang beralasan karena petani perlu segera mengolah lahannya untuk tanam kembali, belum lagi dia harus menjemur jika akan menjual dalam bentuk beras. Dalam hitungan petani, mereka akan mengalami kerugian menjual beras karena harganya yang rendah terutama saat panen, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk penjemuran dan penggilingan. Sementara itu, jika menyimpan beras dan menunggu harga beras tinggi, sulit dilakukan karena hutang harus segera dilunasi dan kebutuhan hidup harus dipenuhi, jelas Pak Ruwiyono. Dia menambahkan bahwa sebaiknya subsidi pupuk itu diganti saja dengan subsidi harga jual karena jatah subsidi pupuk maksimal hanya untuk 2 ha lahan, faktanya banyak petani yang memiliki sawah lebih dari 2 ha. Jadi, dengan subsidi harga jual gabah maka petani merasa adil, efeknya juga petani akan berupaya meningkatkan produksi sawahnya. Sebagai seorang istri, Siti senantiasa mendukung aktivitas suami. Ia senantiasa turut menanam padi dan merumput. Namun, yang ia rasakan semakin lama semakin sedikit saja kaum wanita yang turun ke sawah. Saat ini umumnya hanya yang berusia 40–60 tahun saja, dan bisa jadi di masa yang akan datang semakin berkurang minat wanita untuk turun ke sawah karena dianggap kegiatan yang kasar.

Pak Muhammad adalah seseorang yang dengan banyak profesi dari Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi. Sulung dari tujuh bersaudara ini berusia 57 tahun, adalah Sarjana Pendidikan dari Universitas

Sjakhyakirti Palembang, yang tamat pada tahun 2016. Orang tuanya juga berasal dari Tanjung Aur, begitu juga dengan Ningimah istrinya yang saat ini berusia 54 tahun. Mereka asli Sumatra Selatan dari etnis Melayu. Memiliki tiga orang anak laki-laki dan tiga perempuan. Dua orang anak laki-lakinya sudah berumah tangga. Yang pertama tinggal di desa tetangga yaitu Desa Pulau Karang, Kecamatan Rambutan. Meskipun tidak begitu jauh lokasinya, kecamatan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Anak yang kedua, rumahnya di belakang rumah Pak Muhammad, yang dibangun oleh Pak Muhammad. Kedua anaknya yang sudah berumah tangga ini memiliki warung, tetapi dia terkadang juga masih mendukung biaya untuk anak-anaknya. “Maklumlah mereka masih baru bergerak, sehingga masih perlu dibantu,” kata Pak Muhammad. “Mereka juga adalah aset kita yang akan merawat kita kelak,” timpal istrinya.

Pengalamannya sebagai petani padi baru dimulai sejak tahun 2014 karena sesungguhnya pencetakan sawah baru dimulai di desa ini pada tahun 2012 seluas 100 ha. Kalaupun sebelumnya para petani sudah ada yang bertanam padi, penanaman padi itu adalah padi ladang yang ditanam pada pembukaan lahan kebun karet. Artinya, ditanam sebelum penanaman karet atau di antara karet yang masih memungkinkan ditanami padi.

Alasannya menjadi petani padi, selain karena faktor lingkungan alamnya juga untuk menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa seorang guru seperti dia juga masih bisa jadi petani. Kecintaannya terhadap profesi petani ditunjukkan juga dengan menjadi ketua kelompok tani Sinar Desa dan ketua Gapoktan Tani Mandiri. Dia juga pernah merangkap sebagai ketua Badan Pengawas Desa (BPD) 3 periode dan pernah juga menjadi ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di desanya saat pemilu. Guru dengan golongan III/b ini mengajar di SD Negeri 1 Tanjung Aur, juga berprofesi sebagai pengepul ikan dan menyewa satu lokasi tangkapan ikan seluas 200 ha.

Selain sebagai ibu rumah tangga, Bu Ningimah juga aktif di bidang pertanian. Mereka memiliki 20 ekor ternak sapi, mereka sebut

sapi lokal yang dipelihara dalam kandang ukuran 5 x 8 m, walaupun terkadang dilepas, ungkapnya. Diakuinya, dari semua sumber pendapatan itu, tanaman padi yang luasnya 18 ha adalah sumber yang terbesar, namun hasil di sawah lebak tersebut yang ditanami padi Inpari 32 hanya menghasilkan GKP 3 t/ha.

Usahanya di bidang perikanan sebagai pengepul ikan, biasanya ramai mendapat ikan pada bulan Desember–Juni. Pada bulan tersebut, dalam satu hari minimal lima orang menyeter ikan dan bisa juga mencapai 15 orang, mulai subuh hingga sore hari. Ikan yang diperoleh adalah ikan sungai seperti gabus, sepat, dan lele. Sementara itu, di luar musim (Juli–November) tetap juga ada yang menyeter ikannya, dalam satu minggu berkisar 1–2 orang saja. Tiap kali menjual ke Pak Muhammad, setiap orang pada musim ikan biasanya rata-rata menjual 5 kg/orang/hari. Jika di luar musim, hanya mereka yang punya stok simpanan saja yang menjual, karena menjualnya paling-paling satu kali dalam satu minggu mereka dapat menjual 50–100 kg/orang. Simpanan ikan tersebut diperoleh dari lebung yang ada di lebak dalam.

Seperti warga pada umumnya, rumah keluarga ini juga berupa rumah panggung berukuran 5 x 8 m dan di bagian bawahnya juga menjadi ruangan yang dapat ditempati. Dengan penghuni rumah yang relatif banyak, dia memiliki lima unit kendaraan roda dua, kendaraan roda empat sebanyak tiga unit (dua mobil *pick up* dan satu *minibus*). Selain itu, dia juga mendapat titipan dari kelompoknya untuk menyimpan traktor besar roda empat, yang merupakan bantuan pemerintah.

Pada tahun 2022 lalu ada hal yang menyakitkan baginya, di mana dia juga menjadi kontraktor yang mengadakan tenaga kerja di PT. Sinar Mas (lokasi Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, OKI). Tenaga kerja yang dikelolanya untuk penanaman dan perawatan tanaman akasia minggat dari lokasi kerjanya, sehingga Pak Muhammad menderita kerugian mencapai Rp110 juta. “*Yah* apa boleh buat, itu risiko berusaha. Saya bersyukur masih memiliki sumber penghasilan lain,” tambahnya.

J. Penutup: Kilas Balik Membaca Pertanian Food Estate (FE)

Sensus Pertanian 2023, dilakukan sebagai upaya mendapatkan data dan informasi pertanian sebenar-benarnya yang bermanfaat untuk perencanaan di bidang pertanian. Sensus Pertanian 2023 juga dilakukan di lokasi FE padi di Kabupaten OKI. Disadari pencacahan yang dilakukan terhadap pelaku usaha pertanian perorangan ini penuh dengan dinamika, seperti pemahaman yang berbeda dari petani terhadap makna sensus yang diselengi juga dengan adanya antipati dari beberapa petani. Kurang lancarnya pencacahan pada saat baru memulai di tahap awal, terutama pada pencacah sebagai pendatang baru pada pelaksana sensus, akhirnya menjadi lancar setelah mewawancarai beberapa petani.

Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dengan pengawasan berjenjang tentu semakin memberikan jaminan terhadap kebenaran output yang diperoleh. Dengan mempelajari secara mendalam salah satu program pemerintah yaitu FE padi yang juga menjadi lokasi pelaksanaan ST2023, memberikan gambaran, betapa perencanaan suatu program tidak dipahami oleh sebagian besar petani yang turut menjadi bagian dari FE padi tersebut. Pelibatan yang terbatas pada ketua-ketua kelompok yang merupakan keterwakilan petani dapat dipahami untuk lebih efisien dan terfokusnya pembahasan suatu program. Namun, diseminasi kegiatan ke anggota lain ternyata tidak berlangsung lancar, terbukti adanya petani yang merasa belum pernah mendengar istilah FE tersebut, apalagi untuk memahaminya, walaupun program ini juga merupakan keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran betapa pentingnya partisipasi semua lapisan petani dan pihak lain yang terkait pelaksanaannya agar program berjalan dengan lancar. Pembelajaran mendalam yang diperoleh dari petani terkait FE padi sebagai peserta Sensus Pertanian 2023 juga sebagai evaluasi terhadap perlunya studi yang mendalam di mana suatu program dapat terlaksana dengan baik tentu dengan mengevaluasi sumberdaya alam, sosial ekonomi petani, dan kelembagaan pendukungnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sensus Pertanian 2023. Pencacahan lengkap, pedoman petugas lapang, 2A2*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2023). *Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka 2023*. BPS Kabupaten OKI.
- Badan Pusat Statistik Sumsel. (2022). *Sumatera Selatan dalam angka 2022*. BPS Sumsel.
- Guillem, E. E., Barnes, A. P., Rounsevell, M. D. A., & Renwick, A. (2012). Refining perception-based farmer typologies with the analysis of past census data. *Journal of Environmental Management*, 110, 226–235. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.020>
- Kementerian Pertanian RI. (2019). *Grand design pengembangan korporasi petani sebagai penggerak ekonomi kawasan pertanian untuk kesejahteraan petani*.
- Kementerian Pertanian RI. (2020). *Grand design pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Mottaleb, K. A., Krupnik, T. J., & Erenstein, O. (2016). Factors associated with small-scale agricultural machinery adoption in Bangladesh: Census findings. *Journal of Rural Studies*, 46, 155–168. <https://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.012>
- Ricciardi, V., Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Jarvis, L., & Chookolingo, B. (2018). An open-access dataset of crop production by farm size from agricultural censuses and surveys. *Data in Brief*, 19, 1970–1988. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.06.057>
- Tejoyuwono. (2022). *Pengembangan lahan basah rawa & gambut: Masalah & mudarat*. Penerbit Andi.
- Villani, R., Sabbatini, T., Perez, O. M., Guiomar, N., & Debolini, M. (2019). An open dataset about georeferenced harmonized national agricultural censuses and surveys of seven mediterranean countries. *Data in Brief*, 27, 104774. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104774>